

**TESIS**

**STRATEGI PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN  
DAERAH DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
(STUDI KASUS: BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA)**

Disusun dan diajukan oleh

**MUTIAH ILMU DARAJAT HAQ  
P022181041**



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**STRATEGI PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN  
DAERAH DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
(STUDI KASUS: BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA)**

*STRATEGY OF IMPLEMENTATION OF REGIONAL GOVERNMENT  
INFORMATION SYSTEM IN SOUTHEAST SULAWESI PROVINCIAL  
GOVERNMENT  
(CASE STUDY: BAPPEDA OF SOUTHEAST SULAWESI PROVINCIAL  
GOVERNMENT)*

**Tesis**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister**

**Program Studi**

**Perencanaan dan Pengembangan Wilayah**

**Disusun dan Diajukan oleh**

**MUTIAH ILMI DARAJAT HAQ**

**Kepada**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**STRATEGI PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN  
DAERAH DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
(STUDI KASUS: BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**MUTIAH ILMU DARAJAT HAQ**

**P022181041**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 27 September 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi Syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



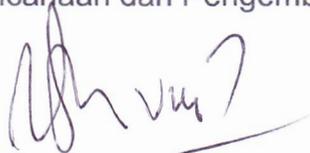
Dr. Jusni, SE, M.Si  
Nip.196101051990021002

Pembimbing Pendamping



Dr. Ir. Rahmadanih, M.Si  
Nip.196604271991032002

Ketua Program Studi.  
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah



Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng  
Nip.196207271989031003

Dekan Sekolah Pascasarjana  
Universitas Hasanuddin



Prof. dr. Budu, Ph.D. SP.M(K). M.Med Ed  
Nip.196612311995031009

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutiah Ilmi Darajat Haq  
NIM : P022181041  
Program Studi : Perencanaan dan Pengembangan Wilayah  
Jenjang : Magister (S2)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis adalah merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 27 September 2022

Yang menyatakan,



**Mutiah Ilmi Darajat Haq**

## PRAKATA

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufik, dan Karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis dengan Judul “Strategi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Studi Kasus : Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara)”.

Penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak selama proses penyelesaian Tesis ini, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan -kemudahan selama mengikuti proses studi.
2. Bapak Dr. Jusni, SE., M.Si selaku Ketua Komisi Penasihat dan Ibu Dr. Ir. Rahmadanih, M.Si selaku anggota komisi penasehat atas segala bimbingan, arahan dan masukan dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr. Muh. Hatta Jamil, SP., M.Si , Bapak Dr. Muhammad Yunus, MA., dan Bapak Drs. Hasbi, M.Si., Ph.D atas kesediannya menjadi penguji di dalam penelitian ini.
4. Kepada Ayahanda Tercinta, Ir. Muh. Hakku Wahab, M.Si atas segala limpahan kasih sayang serta doanya kepada penulis dalam menyelesaikan tahapan ini.
5. Kepada suami tercinta, Fadhil Muhajir, S.Kom atas ridho dan dukungannya, juga seluruh keluarga tercinta kedua mertua yang senantiasa mendukung dan terkhusus kedua buah hati yang senantiasa menjadi motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

6. Segenap bapak dan ibu dosen serta staf administrasi Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin atas segala pelayanan yang diberikan.
7. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajaran yang terus menerus memotivasi penulis untuk menyelesaikan tesis ini dan kemudahan dalam mendapatkan data penelitian ini.
8. Pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut mengantarkan penulis hingga ke tahapan ini.

Akhirnya penulis berharap, tesis ini dapat bermanfaat bagi perencanaan dan pengembangan wilayah dan dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Makassar, September 2022

**Mutiah Ilmi Darajat Haq**

## ABSTRAK

**Mutiah Ilmi Darajat Haq, 2022.** Strategi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Studi Kasus : Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara). (Dibimbing oleh **Jusni** dan **Rahmadanih**).

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai suatu sistem informasi dan kebijakan publik sangat berguna dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis a) Implementasi kebijakan pemerintah tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, b) Faktor yang mempengaruhi penerapan SIPD di Provinsi Sulawesi Tenggara dan c) Strategi penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Juli 2021 – April 2022 dan dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada instansi pengelola SIPD dengan memfokuskan pada Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai instansi pengelola informasi pembangunan daerah di dalam SIPD. Hasil penelitian menemukan bahwa a) Implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan model George C. Edward III telah berjalan dengan baik dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, 2) Faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan SIPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu a) Kondisi lingkungan, b) Hubungan antar organisasi, c) Sumber Daya dan d) Karakter institusi Implementor dan 3) Strategi dalam implementasi SIPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain : a) Mendorong perbaikan sarana dan prasarana yang lebih optimal dalam implementasi SIPD di Provinsi Sulawesi Tenggara, b) Meningkatkan kualitas SDM yang belum merata dengan sosialisasi dan Bimtek, c) Menyamakan pemahaman antar lembaga stakeholder mengenai peraturan SIPD yang dikembangkan oleh Pusdatin dan mendorong dibentuknya tim kerja daerah untuk mendorong peningkatan SDM dalam mengelola SIPD, serta d) Menggencarkan Bimtek sehingga mendorong peningkatan kualitas SDM, meningkatkan pemahaman yang mendalam terkait SIPD sehingga mengurangi benturan SIPD dengan nomenklatur yang lama.

**Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, SIPD, Pemprov Sulawesi Tenggara***

## ABSTRACT

**Mutiah Ilimi Darajat Haq, 2022.** Strategy for the Implementation of Local Government Information Systems in Southeast Sulawesi Province (Study Case : Bappeda of Southeast Sulawesi Province). (Supervised by **Jusni** and **Rahmadanih**).

The Regional Government Information System (SIPD) as an information system and public policy is very useful in supporting regional development planning . This study aims to identify and analyze a) The implementation of government policies regarding the Regional Government Information System in the Southeast Sulawesi Province, b) The factors that influence the implementation of SIPD in Southeast Sulawesi Province and c) The strategy for implementing the Regional Government Information System in Southeast Sulawesi Province. This research was conducted in July 2021 – April 2022 and was carried out in Southeast Sulawesi Province at the SIPD management agency by focusing on the Southeast Sulawesi Province Bappeda as the agency for managing regional development information within SIPD. The results of the study found that a) The implementation of the Regional Government Information System (SIPD) policy in the Southeast Sulawesi Provincial Government, based on the George C. Edward III model has been running well in terms of communication, resources, disposition and bureaucratic structure, 2) Factors that influence in the implementation of SIPD policies within the Southeast Sulawesi Provincial Government,, namely a) Environmental conditions, b) Inter-organizational relations, c) Resources and d) Implementor institutional characteristics and 3) Strategies in implementing SIPD in the Southeast Sulawesi Provincial Government include: a) Encouraging the improvement of more optimal facilities and infrastructure in the implementation of SIPD in Southeast Sulawesi Province, b) Improving the quality of human resources that have not been evenly distributed through socialization and technical guidance, c) Equalizing understanding between institutions stakeholders regarding SIPD regulations developed by Pusdatin and encouraging the formation of regional work teams to encourage increased human resources in managing SIPD, and d) Intensify technical guidance so as to encourage the improvement of the quality of human resources, increase in-depth understanding of SIPD so as to reduce the clash of SIPD with the old nomenclature.

**Keywords:** *Policy Implementation, SIPD, Southeast Sulawesi Provincial Government*

## DAFTAR ISI

<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Konsep Strategi.....	8
B. Konsep Pemerintahan Daerah.....	12
C. Konsep E-Government.....	14
D. Konsep dan Teori Implementasi .....	19
E. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah .....	27
F. Teori Keagenan .....	36
G. Konsep Perencanaan Pembangunan.....	38
H. Analisis SWOT .....	40
I. Tinjauan Hasil Penelitian.....	42
J. Dasar Kerangka Konseptual.....	54
<b>BAB III DESAIN PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	57
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	57
C. Informan Penelitian dan Fokus Penelitian.....	58
D. Jenis dan Sumber Data .....	58
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	59
F. Teknik Validitas Data .....	60

G. Teknik Analisis Data.....	60
H. Fokus Penelitian.....	66
I. Matriks Penelitian.....	67
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	69
B. Hasil Penelitian.....	73
C. Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	105
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>122</b>
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>124</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Mapping Penelitian Relevan .....	51
<b>Tabel 2</b> Matriks SWOT .....	66
<b>Tabel 3</b> Matriks Penelitian .....	67
<b>Tabel 4</b> Temuan Penelitian.....	99
<b>Tabel 5</b> Perhitungan IFAS Implementasi SIPD di Provinsi Sulawesi Tenggara ....	100
<b>Tabel 6</b> Perhitungan EFAS Implementasi SIPD di Provinsi Sulawesi Tenggara ..	102
<b>Tabel 7</b> Matriks SWOT pada Implementasi SIPD Pemprov Sulawesi Tenggara ..	105

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b>	Ruang lingkup interaksi <i>e-government</i> .....	17
<b>Gambar 2</b>	Konsep Sistem Informasi Pemerintah Daerah .....	31
<b>Gambar 3</b>	Arsitektur Sistem Informasi Pemerintahan Daerah .....	35
<b>Gambar 4</b>	Proses Perencanaan dengan Analisis SWOT.....	40
<b>Gambar 5</b>	Kuadran SWOT .....	42
<b>Gambar 6</b>	Kerangka konsep penelitian.....	56
<b>Gambar 7</b>	Komponen Analisis Data Model Interaktif .....	61
<b>Gambar 8</b>	Pembobotan Nilai EFAS .....	63
<b>Gambar 9</b>	Pembobotan Nilai IFAS .....	64
<b>Gambar 10</b>	Struktur organisasi Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara.....	71
<b>Gambar 11</b>	Fasilitas Jaringan Internet di Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara ...	83
<b>Gambar 12</b>	Skema rencana pembangunan daerah dan hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran .....	85
<b>Gambar 13</b>	Kuadran Diagram SWOT .....	104
<b>Gambar 14</b>	Alur Implementasi Kebijakan dan Strategi Penerapan .....	120

## DAFTAR SINGKATAN

Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah
IT	: <i>Information Technology</i>
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemprov	: Pemerintah Provinsi
Perda	: Peraturan Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Pergub	: Peraturan Gubernur
Prov	: Provinsi
Pusdatin	: Pusat Data Teknologi dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan
RKPD	: Rencana Kerja Pembangunan Daerah
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SDM	: Sumber Daya Manusia
SI	: Sistem Informasi
SIPD	: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPPN	: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sultra	: Sulawesi Tenggara
SWOT	: <i>Strength, Weakness, Opportunities and Threats</i>
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan sistem demokrasi dimana dijelaskan bahwa demokrasi adalah sistem yang meyakini bahwa pemerintahan dipilih oleh rakyat, demi rakyat dan untuk rakyat. Oleh karenanya, segala sesuatu yang dilaksanakan oleh pemerintah haruslah berdampak besar dan signifikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Tugas yang diemban oleh pemerintahan baik tingkat pusat hingga daerah adalah memenuhi kepentingan rakyat seperti kegiatan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat demi mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia (Syamsinar, 2016).

Salah satu yang mendukung keberhasilan dan kualitas perencanaan pembangunan adalah tersedianya data dan informasi yang menyangkut sumberdaya yang mendukung pembangunan dan sumber-sumber pendapatan negara. Selaras dengan implementasi program pembangunan yang berjalan cepat diperlukan sajian data dan informasi terbaru sebagai bahan eksplorasi yang tidak cukup lagi dengan data manual akan tetapi menjadi lebih mudah dengan data elektronik yang dikelola dengan bertanggung jawab. Perencanaan yang efektif dan efisien diperlukan untuk mewujudkan dan merealisasikan tujuan perencanaan pembangunan. Data dan informasi yang dihasilkan dalam merencanakan pembangunan akan sangat akurat dan konsisten dengan penggunaan serta pemanfaatan Sistem Informasi (SI).

Sistem Informasi adalah suatu kumpulan yang terdiri dari manusia, *hardware*, *software*, jaringan komunikasi serta sumber daya yang mengumpulkan, mengubah, mengolah dan menyebarkan informasi di dalam sebuah organisasi (Anggraeni dan Irviani : 2017).

Hal itu juga termaktub pada pasal 391 di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah disebutkan bahwa pemerintahan daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah berupa informasi pembangunan daerah maupun informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu informasi. Dan pada pasal 395 juga disebutkan pemerintah daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi pemerintahan daerah lainnya. Untuk memenuhi kewajiban akan pasal-pasal tersebut dan sebagai pelengkap menggantikan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah maka dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang baru.

Sebagaimana yang diuraikan pada pasal 1 ayat 12 sistem informasi pemerintahan daerah yang kemudian disebut SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Peraturan ini juga didasarkan pada pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disebutkan bahwa arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu secara nasional.

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satuan Data Indonesia menyebutkan bahwa Satu Data Indonesia bertujuan memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Peraturan ini mendukung Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penelitian relevan yang mengungkap peran dari SIPD sebagai bagian dari perencanaan daerah telah dilaksanakan oleh Ruhana (2017) yang menyimpulkan bahwa penerapan SIPD akan sangat penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan melalui berbagai tahapan seperti tahapan penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah salah satu kebijakan publik yang perlu diimplementasikan kepada publik mengacu pada definisi implementasi oleh Mazmanian dan Sebatier (Waluyo, 2007) yang menyatakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting ataupun

badan peradilan lainnya, dimana keputusan tersebut dengan jelas mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin diraih dengan berbagai metode dalam mengatur proses implementasinya.

. Hal ini juga sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Salusu (Tahir, 2014) menyatakan bahwa implementasi sebagai operasionalisasi dari rangkaian kegiatan dalam meraih sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai kepada pegawai pada tingkatan terbawah.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya suatu sistem yang berisi data dan informasi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan, arahan dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan di pusat dan daerah. Adanya data dan informasi yang saling terhubung memberi potensi yang besar akan kevalidan dan keakuratan data daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan di Indonesia.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, dan sistem pemerintahan daerah lainnya, juga sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. SIPD merupakan produk Teknologi Informasi (IT) yang berbasis jejaring mengumpulkan data secara *online*, *realtime* dan terintegrasi. SIPD sebagai dukungan dalam terwujudnya program dan kegiatan dari tahap perencanaan hingga evaluasi yang berjalan rasional, efektif dan efisien, pemanfaatan data yang terintegrasi tentang perkembangan pembangunan di setiap daerah, serta transparansi akuntabilitas publik ke masyarakat.

Berdasarkan kutipan Conyers & Hill dalam Arsyad (2004) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang, sehingga pemanfaatan terhadap berbagai sumber daya baik sumber daya alam, modal dan sumber daya manusia membutuhkan perencanaan yang baik sehingga nantinya dapat dikelola secara baik untuk mendukung pelaksanaan pembangunan (Fikri, Nurpratiwi, and Saleh 2015). Dalam mendukung tujuan perencanaan pembangunan nasional di Indonesia pemerintah telah menerapkan pemanfaatan SIPD secara nasional.

Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda dan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD menjalankan fungsi sebagai pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Bappeda sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan daerah berfungsi mengelola informasi pembangunan daerah, data dan informasi yang dikelola berupa data perencanaan, analisis, profil dan informasi pembangunan daerah. BPKAD sesuai tugas fungsinya mengelola informasi keuangan daerah yang memuat informasi perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan daerah, barang milik daerah dan keuangan daerah lainnya.

Sebagai daerah yang mendukung transformasi digital khususnya *e-government* di Indonesia dan menjadi salah satu daerah yang berkembang menuju *smart city*, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu daerah provinsi yang telah menerapkan pemanfaatan SIPD sebagai salah satu teknologi informasi berbentuk aplikasi jejaring (*web*) sebagaimana amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD.

Bappeda selain sebagai salah satu pengelola di dalam SIPD juga sebagai lembaga yang memanfaatkan SIPD dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penerapan aplikasi SIPD ditujukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan adanya aplikasi SIPD dapat mendukung dalam penetapan prioritas permasalahan di daerah guna meningkatkan kualitas produk kebijakan publik dan mempromosikan potensi ekonomi daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun jalannya penerapan SIPD di Provinsi Sulawesi Tenggara tidaklah mudah dan menemui beberapa kendala. Selain membutuhkan kerja sama dan kerja keras dari setiap instansi yang terlibat, observasi awal menemukan kendala ketidak lengkapan data informasi pembangunan daerah, keterlambatan penginputan data perencanaan oleh SKPD serta operator penginputan di tiap SKPD yang belum paham penggunaan aplikasi serta adanya perubahan nomenklatur Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Beberapa kendala tersebut memengaruhi penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hal itu bertentangan dengan teori implementasi dimana dinyatakan jika proses implementasi telah dilaksanakan, maka akan diharapkan suatu keluaran berupa hasil segera dan dampak akhir. Hasil segera dimaksudkan sebagai pengaruh atau akibat jangka pendek yang dihasilkan oleh implementasi kebijakan sedangkan dampak akhir dari kebijakan adalah sejumlah akibat yang terjadi melalui proses panjang.

Penelitian relevan terkait yang membahas mengenai strategi penerapan Strategi Informasi ataupun bentuk *e-government* lainnya telah dilakukan oleh Gathungu dan Mungai (2012) yang menyimpulkan bahwa implementasi dalam inisiatif *e-government* di Kenya sangat dipengaruhi oleh Strategi, Faktor Teknologi, Kebijakan dan Perubahan organisasi.

Penelitian relevan lainnya telah dilakukan oleh Mungai (2017) yang menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan *e-government* harus dievaluasi kembali sehingga efektifitas kelembagaan *e-government* tercapai dengan menyelaraskan dengan perubahan teknologi dan kebutuhan para pengguna. Strategi lainnya yang perlu dilakukan dalam rangka penerapan *e-government* adalah perlunya pengembangan kerangka hukum *e-government* yang komprehensif sehingga pelaksanaan dapat dilaksanakan secara optimal.

Penelitian relevan lainnya telah dilakukan oleh Yohanes (2013) yang menyimpulkan bahwa strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menerapkan teknologi informasi yaitu a) mengembangkan organisasi dan tata kerja, b) membuat aturan perundangan dan kebijakan, c) mengembangkan SDM untuk menerapkan teknologi informasi, d) membangun infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data yang memadai, e) mengembangkan perangkat lunak yang diperlukan, f) mengembangkan layanan informasi yang mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang kompetitif serta menarik investor ke Sintang sehingga mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi regional.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas dan bahwa penelitian terkait permasalahan tersebut belum pernah dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam implementasi penerapan SIPD beserta faktor yang mempengaruhi penerapan dan pada akhirnya mampu dirumuskan strategi penerapan SIPD di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan harapan setiap penanggung jawab yang terlibat di dalam pemanfaatan SIPD telah

paham tujuan manfaat yang didapat akan berpengaruh dalam menunjang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang akan mendukung perencanaan pembangunan nasional melalui integrasi data sebagaimana amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD serta menguasai dan paham prosedur pemanfaatan SIPD dan pengelolaannya sehingga aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini dapat menjalankan manfaatnya secara efektif dan efisien sehingga mendukung terwujudnya *good government* dan perbaikan birokrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

## **B. Rumusan Masalah**

Pemerintahan Daerah wajib menyediakan informasi pembangunan daerah maupun keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menegaskan tugas yang harus diemban oleh pemerintahan daerah. Sebagai suatu kebijakan public yang dikeluarkan oleh pemerintah, penerapan SIPD tidaklah mudah dan terkadang menemui beberapa kendala atau hambatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya maka dibuat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD di Provinsi Sulawesi Tenggara?
2. Apa saja faktor yang berperan dalam penerapan SIPD di Provinsi Sulawesi Tenggara?
3. Bagaimana strategi penerapan SIPD di Provinsi Sulawesi Tenggara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengkaji implementasi kebijakan pemerintah tentang SIPD di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Menganalisis faktor yang berperan dalam penerapan SIPD di Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Merumuskan strategi penerapan SIPD di Provinsi Sulawesi Tenggara.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara empiris yang diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis
  - a. Memperluas dan memperdalam pemahaman dan pengetahuan terkait perencanaan dan pembangunan daerah serta implementasi sebuah sistem informasi dan kebijakan public.
  - b. Menjadi bahan referensi bagi penelitian yang relevan.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan penelitian ini menjadi bahan informasi dan masukan berharga bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya dan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara terkhusus dalam mengimplementasikan SIPD sehingga berguna bagi perencanaan pembangunan daerah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Strategi

Pearce dan Robinson (2005) mengemukakan bahwa *Strategy is company's game plan*. Strategi merupakan rencana permainan yang akan dijalankan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Rencana yang baik mengandung tujuan dan sasaran yang hendak dicapai serta menguraikan secara garis besar bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan dalam permainan yang sesungguhnya, manajemen perusahaan akan mengambil kebijakan dan tindakan yang diperlukan. Permainan yang baik akan mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. (Soepardi 2005)

Kemampuan mengelola organisasi diawali dengan kemampuan organisasi merencanakan dan mengimplementasikan strategi. Banyak praktisi dan akademisi menyakini bahwa keberhasilan kinerja sebuah perusahaan ditentukan oleh strateginya. Tetapi pendapat ini tidak mudah untuk dijelaskan secara konsep maupun secara empiris. Secara konsep, strategi yang mempunyai banyak arti justru menimbulkan kebingungan atau ketidakjelasan. (Aldi 2015)

Rumel (1991) mengemukakan strategi telah menjadi area penelitian yang menarik dan menantang lebih dari satu dekade. (Aldi 2015) Perkembangan ilmu yang masih muda menyebabkan banyak perdebatan dan kebingungan dalam membuat definisi, konsep, dan pengembangan teori strategi. Hambrick (1983) menyatakan bahwa seharusnya adanya faktor situasional dan multidimensional strategi akibatnya adanya ketidak konsistenan dalam pengembangan literatur.

Tang dan Thomas (1994) menyatakan beberapa kesulitan dalam pengembangan teori strategi. Kesulitan pertama adalah manajemen strategik berasal dan berkembang dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Akibatnya terdapat beragam metoda penelitian dalam pengembangan manajemen strategi. Rumel (1994) menyatakan bahwa strategi berkembang dan berasal dari ilmu ekonomika, sosiologi organisasional, ilmu politik, dan psikologi. Lebih jauh, ilmu-ilmu tersebut membawa kepentingan dan isu yang sesuai dengan akar ilmu tersebut.

Rumel (1994) mencatat bahwa sumbangan ilmu ekonomi dapat dilihat dari teori biaya transaksi, teori agensi, teori permainan, sedangkan sumbangan ilmu sosiologi dalam dilihat dari teori *resource dependence* milik Salancik dan Pfeffer, *population ecology* milik Hannan dan Freeman, atau *new institutionalism*. Ilmu politik

menyumbang teroma chaos bagi strategi, dan psikologi berkaitan dengan perilaku individu. (Aldi 2015)

Pengembangan konsep strategi memerlukan kejelasan definisi, hal inilah yang belum terdapat di organisasi sehingga menurut Tang dan Thomas (1994) inilah kesulitan kedua. Definisi yang ambigu menyebabkan adanya hambatan komunikasi bagi peneliti, dan praktisi. Usaha untuk menemukan definisi strategi `universal` diperlukan untuk memahami dan mengintegrasikan konsep. Banyak definisi strategi yang telah dikemukakan di berbagai literatur, tetapi definisi ini hanya untuk kepentingan definisi semata, akibatnya tidak dapat memuaskan dahaga akan pengertian strategi. Sebagai contoh Tang dan Thomas (1994) menyatakan bahwa strategi perusahaan dipandang sebagai cara untuk mendapatkan hasil dari berbagai kondisi eksternal yang berbeda, pandangan ini terlalu luas untuk membantu pendefinisian dan pengembangan teori strategi. (Aldi 2015)

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani *strategos* atau *the art of general*.(Aldi 2015; Soepardi 2005) Dikemukakan strategi berkembang dari domain militer berdasarkan penemuan bahwa pada umumnya beberapa buku-buku militer menggunakan kata strategi sebagai upaya untuk menaklukkan musuh.

Setiap peneliti, akademisi, maupun praktisi mempunyai pandangan serta arti yang berbeda tentang strategi. Untuk memahami arti strategi, penulis mengemukakan beberapa arti strategi. (Aldi 2015)

1. Strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan organisasi

Beberapa pendapat yang sesuai dengan arti ini misalnya pendapat Thompson, Strickland, dan Gamble (2006) yang menyatakan bahwa strategi perusahaan terdiri dari gerakan pesaing, pendekatan bisnis yang digunakan manajer untuk meningkatkan pertumbuhan, usaha untuk menarik dan memuaskan pelanggan, dan mencapai target yang telah ditetapkan. Markides (2004) menyatakan bahwa proses untuk mengembangkan strategi superior adalah bagian dari perencanaan, bagian dari trial dan error, sampai perusahaan mendapatkan tujuannya. Mintzberg (1998) menyatakan bahwa strategi adalah usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui seperangkat perencanaan yang telah disusun secara formal oleh CEO.

2. Strategi didefinisikan sebagai competitive domain dalam organisasi

Secara umum, strategi organisasi didefinisikan oleh pola-pola strategi yang dilakukan oleh perusahaan. Mintzberg (1998) menyatakan bahwa strategi sebagai pola berarti strategi adalah perilaku yang konsisten dan mudah

diprediksi berdasarkan pola-pola yang telah dilakukan di masa lalu. Poin yang ingin dikemukakan oleh Mintzberg (1998) adalah setiap kali manajer atau CEO melakukan sebuah strategi yang relatif sama maka mereka dapat dikatakan melakukan strategi sebagai sebuah pola.

3. Strategi sebagai sifat yang koheren, integratif dan memandang organisasi sebagai satu kesatuan

Glueck (1976) dalam Hax dan Majluf (1988) menyatakan strategi adalah satu kesatuan, bersifat integratif dan komprehensif dalam pendesaianan dan perencanaan strategi agar tujuan organisasi tercapai. Mintzberg (1998) mengemukakan bahwa strategi merupakan usaha bersama dari berbagai departemen untuk mencapai tujuan jangka panjang, pendek maupun menengah perusahaan.

4. Strategi sebagai respon terhadap peluang dan ancaman eksternal, dan kekuatan dan kelemahan internal

Menurut pandangan ini strategi dipandang sebagai usaha internal perusahaan dalam memandang kekuatan eksternal. *Design school* Mintzberg (1998) merupakan bentuk konkrit dari pandangan ini. Penciptaan strategi dihasilkan dari interaksi internal dan eksternal perusahaan, dan implementasi strategi berasal dari proses penciptaan ini. Konsep Porter (1980) menyatakan bahwa kemampuan perusahaan menganalisis industri (eksternal) akan membantu perusahaan menganalisis pesaing. Dengan memahami industri, maka perusahaan mampu merespon persaingan dengan menggunakan strategi generik yang sesuai. Konsep rantai nilai yang dikemukakan Porter (1985) merupakan cara internal perusahaan untuk mengoptimalkan kemampuannya untuk menghadapi persaingan. Analisis lima tekanan, pemilihan strategi generik dan penggunaan konsep rantai nilai akan membantu perusahaan menghadapi persaingan. Bila konsep Porter lebih statis, maka konsep Hamel dan Prahalad dapat pula digunakan. Dengan memfokuskan pada kemampuan internal organisasi diharapkan organisasi mampu berkompetisi bukan hanya di pasar sekarang tetapi juga di pasar akan datang. Ward dan Duray (2000) menyatakan bahwa strategi dapat memediasi antara lingkungan dengan kemampuan operasi organisasi dalam proses penciptaan produk. Studi Ward dan Duray (2000) dilakukan pada industri manufaktur di Amerika Serikat. Hal penting dalam studi ini adalah konfirmasi model teori dengan hasil empirik. Slevin dan Covin (1997)

memandang strategi sebagai upaya untuk mengantisipasi perubahan dengan cara mendayagunakan semua kemampuan perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai.

5. Strategi dipandang sebagai usaha untuk mencapai keunggulan kompetitif  
Konsep Porter sangat tepat untuk pendekatan ini karena memandang strategi sebagai usaha mendapatkan keunggulan kompetitif. Sama halnya dengan pendapat Thompson, Strickland, dan Gamble (2006). Hermann (2005) menyatakan strategi sebagai jawaban awal bagi perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif.
6. Strategi sebagai sebuah pilihan  
Perusahaan mempunyai banyak pilihan strategi untuk berkompetisi dengan pesaing. Setiap pilihan strategi mempunyai kelemahan dan kekurangannya misalnya pilihan untuk strategik generik mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Perusahaan perlu memilih strategi yang sesuai dari berbagai pilihan staregi yang tersedia. Sehingga, strategi sebagai sebuah pilihan memandang bahwa organisasi mempunyai pilihan dalam eksekusi strateginya misalnya pilihan untuk menggunakan *emergent* atau *deliberate strategy*.
7. Strategi sebagai hasil pemikiran  
Pendapat ini didukung oleh Ohmae (1982) yang menyatakan bahwa strategi organisasi terletak pada pemikiran pembuat strategi. Ohmae (1982) menyatakan bahwa strategi pertarungan bisnis bertujuan untuk membuat kondisi yang sesuai dengan pemikiran strategis, terutama berkaitan dengan usaha menilai dan menganalisis pesaing. Asumsi yang mendasari adalah *strategic thinking*. Ohmae menambahkan perlunya strategis untuk memahami karakter-karakter perusahaan dan lingkungan secara jernih dan dengan kemampuan pikirnya membuat berbagai kemungkinan yang menguntungkan organisasi. Hasil pemikiran tersebut dalam bersifat linier dan unlinier. Strategi sebagai hasil pemikiran mempunyai arti bahwa setiap individu atau organisasi dapat memikirkan sendiri strategi yang sesuai dengan keadaan organisasi dan dirinya. Dampak penting pendapat ini adalah strategi bersifat personal, artinya sesuai dengan pemikiran staregis.

Menurut Pearce dan Robinson (2005) strategi adalah suatu rangkaian keputusan dan tindakan hasil formulasi dan implementasi dari rencana yang telah didesain untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengertian strategi ini pada intinya

adalah adanya rangkaian kegiatan dalam mencapai kinerja yang direncanakan. Pearce dan Robinson (2005) dalam definisi strategi menggambarkan dengan jelas bahwa strategi ini pada intinya terdiri atas dua bagian, yakni formulasi atau perumusan dan implementasi strategi. (Soepardi 2005)

Menurut Wheelen dan Hunger (2004) perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk mengelola secara efektif peluang-peluang dan ancaman-ancaman yang terdapat dalam lingkungan eksternal dan memfokuskan pada kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Sebelum merumuskan strategi, maka manajer harus melakukan analisis secara seksama terhadap lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun internal. Analisis lingkungan ini menggunakan teknik analisis SWOT. Pada saat perumusan strategi menurut Wheelen dan Hunger (2004) setidaknya terdapat empat aktivitas yang perlu dijalankan. Aktivitas tersebut antara lain: (1) penetapan misi; (2) penetapan tujuan; (3) penetapan strategi; dan (4) penetapan kebijakan. (Soepardi 2005)

Wheelen dan Hunger (2004) mengemukakan *Strategy implementation is the process by which strategies and policies are put into action through the development programs, budgets, and procedures*. Implementasi strategi adalah sekumpulan aktivitas dan pilihan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana strategis. Inti dari definisi ini adalah adanya tindakan untuk melaksanakan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya. Implementasi strategi merupakan bagian kunci (*key part*) dari manajemen strategi keseluruhan. (Soepardi 2005).

## **B. Konsep Pemerintahan Daerah**

Pemerintahan mengandung dua makna yaitu dalam arti luas maupun dalam artian sempit. Pemerintahan dalam artian luas disebut juga *regering* atau *government* yaitu pelaksanaan tugas seluruh badan, lembaga serta petugas yang disertai kewenangan dalam meraih tujuan negara yang sudah direncanakan. Arti pemerintahan mencakup kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudisiil atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga dapat berlaku untuk dan atas nama.

Labolo (2007) mendefinisikan bahwa pemerintahan merupakan upaya yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan kehidupan bersama secara baik dan benar dalam rangka pencapaian tujuan serta maksud yang sudah disepakati bersama-sama.

Definisi lain dikemukakan oleh Kencana (2014) yang menyatakan sebagai berikut

Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan maupun berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syarat yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik objek material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

Sumarno (2008) menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Beberapa definisi pemerintahan yang telah dikemukakan dan diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah sebuah sistem yang memiliki tujuan untuk menyediakan kebutuhan dan melindungi masyarakat dengan memberikan pelayanan pemerintahan sehingga kebutuhan, permintaan, keinginan dan tuntutan dari masyarakat dapat terpenuhi.

Tujuan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan menimbang prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sudah sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang termaktub di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. (Pangerang dan Anugerah, 2017:23).

Supriatna menyitir pendapat De Guzman dan Taples menjelaskan bahwa pemerintahan daerah memiliki beberapa unsur sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah merupakan subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan negara.
2. Pemerintah daerah diatur oleh hukum.

3. Pemerintah daerah memiliki badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat.
4. Pemerintahan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan di daerah mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yuridiksinya (Hanif : 2007).

Rasyid (2000) menjelaskan mengenai tugas-tugas pokok dari pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin ditetapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membeda-bedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan masyarakat.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dilaksanakan oleh lembaga non pemerintahan atau yang akan lebih baik jika dilaksanakan oleh instansi pemerintahan.
5. Melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif dan semacamnya.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang dapat memberi keuntungan kepada masyarakat luas serta kebijakan-kebijakan lain yang secara langsung dapat menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti air, tanah dan hutan.

### **C. Konsep *E-Government***

Osborne dan Plastrik (1992) menyatakan teknologi informasi secara aksiomatik telah dipercaya mampu untuk meningkatkan kinerja fungsi dan proses manajemen pemerintah. Dalam hal ini mendorong tingkat efektivitas pengelolaan informasi yang menjadi titik sentral dalam kepentingan untuk pengambilan keputusan. (Habibullah 2010)

Secara konseptual, *e-government* sebetulnya bukan merupakan sesuatu yang baru. Pemerintah di banyak negara, baik negara maju maupun negara sedang berkembang, telah sejak lama menggunakan sistem komputer untuk membantu dan mendukung pekerjaan administrasi dan pengolahan data yang kesemuanya bermuara pada pelayanan masyarakat (*public service*). Perbedaan yang mencolok antara konsep *e-government* yang dikenal sekarang dengan penerapannya pada masa lalu terletak pada cakupan penggunaan sistem komputer/informasi dalam melayani baik masyarakat maupun *stake holders* lainnya (karyawan/pegawai, departemen/lembaga pemerintah lainnya, organisasi swasta, dan sebagainya). (Cahyadi 2003)

*World Bank* (2001) mengemukakan bahwa *e-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya menuju *good government*. *World Bank* memandang *e-government* merupakan adopsi dari perkembangan dan pemanfaatan teknologi perbankan sedunia. Pengembangan *e-government*, dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas manajemen pemerintahan dengan menggunakan internet dan teknologi digital lainnya. (Habibullah 2010; Nugraha 2018)

Menurut Bank Dunia (Samodra Wibawa 2009), *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti *Wide Area Networks* (WAN) internet, *mobile computing*, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya.

Mustopadijaya (2003) juga berpendapat sama bahwa *electronic administration (e-adm)* merupakan substitusi ungkapan *electronic government (e-gov)* yang diberikan untuk suatu pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet, intranet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya. *e-governement* juga dapat dipahami sebagai penggunaan teknologi berdasarkan *WEB* (jaringan), komunikasi internet, dan dalam kasus tertentu merupakan aplikasi interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas akses ke dan atau dari pemberian layanan dan informasi pemerintah kepada penduduk, dunia usaha, pencari kerja, dan pemerintah lain, baik instansional maupun antar negara. (Habibullah 2010)

Ditambahkan juga oleh Hartono (2010) *e-government* merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (*Information, Communication and Technology*) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan lembaga pemerintah serta stafnya. Sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada warganya. Dengan konsep pengembangan menyangkut hubungan *Government to Government* (G2G), *Government to Business* (G2B) dan *Government to Citizens* (G2C). (Nugraha 2018)

Zweers and Plangue memberikan definisi bahwa *e-government* berhubungan dengan penyedia informasi, layanan atau produk yang dipersiapkan secara elektronik, dengan dan oleh pemerintah, tidak terbatas pada tempat dan waktu serta menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan (Indrajit:2005).

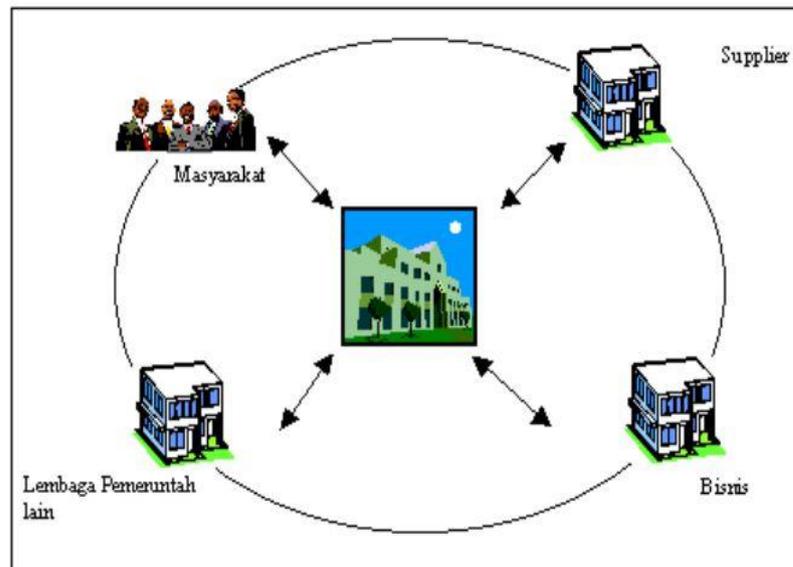
Melalui pengembangan *e-government* ini dilakukan pula penataan sistem manajemen informasi dan proses pelayanan publik dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

Dirangkumkan pengertian *e-government* sebagaimana dijabarkan di atas adalah pemanfaatan daya guna teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan antara lain (1) meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan; (2) memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat; (3) sebagai transparansi akan akuntabilitas manajemen pemerintahan; (4) memaksimalkan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; (5) akses public seluas-luasnya.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *e-government* memiliki cakupan atau ruang lingkup yang cukup luas, bukan saja meliputi seluruh unit dalam suatu organisasi pemerintah tetapi juga mencakup mitra kerjanya (*stakeholders*) yang terdiri dari: (1) Karyawan/Pegawai Lembaga Pemerintah tersebut; (2) Anggota Masyarakat; (3) Pelaku Bisnis; (4) Lembaga Pemerintah lainnya; (5) Pemasok/pembekal alat-alat kantor dan sebagainya (Cahyadi 2003)

Dalam konsep *e-government*, kelima jenis mitra kerja itu berinteraksi dengan lembaga pemerintah melalui jaringan sistem informasi/komputer seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1 Ruang lingkup interaksi *e-government*



Sumber : (Cahyadi 2003)

Indrajit (2005) berpendapat bahwa *e-government* memberi manfaat peningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Konsekuensinya, bertentangan manajemen publik sebelumnya telah menjadi sigma dari birokrasi publik akan berubah menjadi terbuka, aksesif, permisif, dan partisipatif. Pengembangan *e-government* menghasilkan kedekatan dan interaksi atau keterlibatan masyarakat semakin besar, luas dan cepat. Pola interaksi berubah dari *one stop service* menjadi *non-stop service* (Habibullah 2010)

Juniaidi (2005) menyatakan manfaat dari pengembangan *e-government* antara lain :

1. Meningkatkan efisiensi pemerintah.
2. Memberikan berbagai layanan kepada masyarakat secara lebih baik.
3. Memberikan akses informasi kepada public secara luas.
4. Menjadikan penyelenggaraan pemerintah lebih bertanggung jawab dan transparan kepada masyarakat.

Untuk mengembangkan *e-government* ada empat fase yang diusulkan oleh *World Bank* (2002), yakni *Presence* (kehadiran), *Interaction* (interaksi), *Transaction* (transaksi) dan *Transformation* (transformasi). Model yang sama dikemukakan oleh Gartner Research dalam Gupta (2004), mengajukan model *The Value Chain of E-Service*, yang menetapkan empat tahap yang secara khusus dikembangkan dalam

konteks *e-government*. Keempat fase pengembangan tersebut jika dikontekskan untuk pengembangan situs *web e-government* di Indonesia (Nugraha 2018), meliputi:

1. Kehadiran, yaitu memunculkan situs *web* daerah di internet. Dalam tahap ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam situs *web* pemerintah;
2. Interaksi, yaitu *web* daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam tahap ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi seperti fasilitas *download* dan komunikasi *email* dalam situs *web* pemerintah;
3. Transaksi, yaitu *web* pemerintah daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi juga dilengkapi fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah;
4. Transformasi, yaitu dalam hal ini pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi.

Hasibuan (2007) menyatakan beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan *e-government* antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran dalam mengambil keputusan telematika.
2. Langkanya SDM yang berkualitas
3. Masih minimnya infrastruktur telekomunikasi
4. Tarif internet yang masih mahal dan terkadang masih kurang memadai.
5. Penetrasi PC yang masih rendah.

Menurut Mustopadidjaja (2003), tantangan utama dalam pengembangan *e-government* bukanlah pada ketersediaan maupun pendayagunaan teknologinya, tetapi tantangan utama adalah memperbaiki kinerja manajemen pemerintahan, prosedur dan transparan, standar dan akuntabel dan disadari sebagai bentuk operasi yang memang harus disediakan, rutin dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. (Habibullah 2010)

Faktor kritis tersebut dalam SANKRI disebutkan 7 (tujuh) aspek esensial (pilar) dalam pengembangan *e-government* :

1. Manajemen dan organisasi menyangkut suatu unit organisasi dalam pemerintahan yang memiliki kewenangan dan kompetensi yang diperlukan untuk mendesain dan mengelola *e-government*;
2. Penggunaan teknologi; menyangkut tentang investasi penting untuk membuat jaringan infrastruktur, sistem komputer dan sumber daya manusia

untuk mendukung *e-government* dan juga perangkat lunak yang akan digunakan (*soft, hard, and brain ware*);

3. Operasi internal; menyangkut aplikasi-aplikasi untuk operasi internal yang sesuai kebutuhan dan kejelasan operasi manajerial. Operasi internal ini sebenarnya memegang kunci pokok dalam kinerja *e-government* secara keseluruhan. Hal ini karena kehandalan internal manajemen dalam melakukan segala prosedur, biaya, waktu, dan orang, akan sangat mempengaruhi kinerja *e-government* setelah tercipta;
4. Pelayanan dan transaksi adalah pemberian layanan dan penerimaan hak atas layanan yang dilakukan secara elektronik;
5. Partisipasi dan komunikasi masyarakat adalah apakah aplikasi dan pelayanan dapat diamati dan digunakan oleh masyarakat (*government to community*);
6. Komunikasi pemerintah dengan pemerintah adalah apakah *e-government* dapat berhubungan antar pemerintahan (*government to government = G to G*) dalam pertukaran informasi;
7. Isu kebijakan adalah apakah *e-government* dapat menempatkan *privacy* masyarakat, menjamin keamanan diri pengguna informasi, dan penentuan besar biaya dari setiap transaksi.

Dengan dikembangkannya *e-government*, akses informasi pada pemerintah terbuka lebar bagi semua lapisan masyarakat di suatu negara, sehingga apabila diimplementasikan dengan tepat maka secara signifikan dapat memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat negara tersebut. Maka dari itu, implementasinya pada tiap negara haruslah dilaksanakan sesegera mungkin, tanpa ditunda-tunda. Serta dibangun dengan kepemimpinan yang baik dan kerangka pengembangan yang holistik, sehingga memberikan keunggulan kompetitif secara nasional.

#### **D. Konsep dan Teori Implementasi**

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dikaitkan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan

oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. (Wahab 2001)

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan. Menurutnya implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu (Dunn 2003).

Winarno (2008) menjabarkan secara umum istilah kebijakan dipergunakan dalam rangka menunjuk perilaku seseorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Akib (2010) mengemukakan bahwa alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat haruslah diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif.

Menurut Cheema dan Rondinelli (Subarsono 2006) berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor- faktor tersebut diantaranya:

1. Kondisi Lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.

2. Hubungan antar Organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

3. Sumberdaya Organisasi untuk Implementasi Program  
Implementasi kebijakan perlu didukung sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*).
4. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana  
Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

### ***Teori Implementasi Kebijakan***

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat (Aji 2014)

Setelah tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan dan diidentifikasi oleh keputusan kebijakan kemudian implementasi kebijakan akan dimulai, sehingga dapat dimaknai bahwa implementasi kebijakan adalah proses kegiatan oleh beberapa aktor berbeda kemudian pada akhirnya mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri. Terdapat beberapa teori para ahli mengenai model implementasi kebijakan:

1. Teori George C. Edward

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III (1980) disebutnya dengan "*Direct and Indirect Impact on Implementation*" (Dampak langsung dan tidak langsung pada implementasi). Edwards mengemukakan implementasi kebijakan sebagai "*Policy Implementation ..., is the stage of policy making between the establishment of a policy ..., and the consequence of the policy for the people whom it affects*" (Implementasi kebijakan ..., adalah langkah bagi pembuat kebijakan atas suatu kebijakan yang telah

ditetapkan..., dan konsekuensi dari kebijakan itu terhadap orang-orang yang mempengaruhi)". Menurutnya masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention the decision of policy makers will not be carried out successfully* (kurangnya perhatian pembuat keputusan tidak akan membuat keberhasilan) (Abdullah 2016; Kumayus 2020)

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi (Kumayus 2020). Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor memahami apa yang harus dilakukan. Setiap tujuan dan sasaran kebijakan harus disosialisasikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Di sisi lain keberhasilan implementasi kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang berupa sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi implementor dan sumberdaya finansial. Sumber daya manusia harus memiliki watak dan karakteristik, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, dan lain-lain. Apabila implementor memiliki watak dan karakteristik yang baik, ia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Selain hal tersebut keberhasilan implementasi kebijakan harus didukung oleh struktur birokrasi yang baik. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar. Standar inilah yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. (Abdullah 2016).

a. Komunikasi.

Komunikasi menurut Edward, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif baru akan tercapai apabila para pembuat keputusan (*decision maker*) sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan itu baru dapat berjalan manakala komunikasi berlangsung dengan baik. Artinya, suatu keputusan kebijakan atau peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada implementor yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.

Untuk mengetahui sejauh mana komunikasi itu dapat berfungsi secara tepat, akurat, dan konsistensi, ada tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu :

- 1) Transmisi. Dalam penyaluran komunikasi tidak jarang terjadi kesalahpahaman (miskomunikasi) disebabkan komunikasi melalui

beberapa tingkatan birokrasi. Akibatnya, terjadi distorsi membuat implementasi suatu kebijakan gagal.

- 2) Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, tetapi pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Pada tataran yang lain, hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang hendak ditetapkan.
- 3) Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas (untuk diterapkan dan dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

b. Sumberdaya.

Sumberdaya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Ada beberapa faktor yang berpengaruh sehingga sumberdaya dapat berjalan dengan baik, yaitu :

- 1) Staf. Lebih tepat dikenal *Street-level bureaucrats*. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.
- 2) Informasi. Dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu (1) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. (2) Informasi mengenai data kepatuhan dari pada pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- 3) Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

4) Fasilitas. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana), maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Disposisi.

Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

d. Struktur Birokrasi.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan dapat menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan, harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Meski demikian berdasarkan model implementasi kebijakan Edward III di atas, maka kelebihan yang dimilikinya adalah kemampuan menyederhanakan fenomena-fenomena yang kompleks menjadi suatu model implementasi kebijakan yang tidak rumit. Kelemahannya adalah tidak mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor di luar organisasi pelaksana, atau birokrasi pemerintahan.

2. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Berdasarkan kutipan Meter dan Horn dalam Subarsono (2005) menegaskan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan public. (Aneta 2010) Terdapat beberapa variabel yang memengaruhi dan menyangkut dalam proses kebijakan public, adalah:

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
- b. Karakteristik dan agen pelaksana/implementor.
- c. Kondisi sosial, ekonomi dan politik.
- d. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementor.

Implementasi kebijakan dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi dan berlangsung dalam antar hubungan berbagai faktor. Suatu kebijakan menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. (Aji 2014; Aneta 2010)

### 3. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Berdasarkan kutipan Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2005) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*). (Aji 2014) Dalam kutipan Nugroho (2006) Model kerangka analisis implementasi (*a framework for implementation analysis*) yang diperkenalkan oleh Mazmanian dan Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan dalam tiga istilah variabel, yaitu:

- a. Variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah yang dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan yang dikehendaki.
- b. Variabel intervening, yaitu variable kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensinya tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, dan variabel di luar kebijakan yang memengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan public, sikap dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana.
- c. Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar. (Aneta 2010)

Untuk menganalisis fenomena-fenomena di dalam implementasi kebijakan dengan model kerangka analisis implementasi dari teori Mazmanian dan Sabatier ini mampu mengidentifikasi dan menjelaskan variable-variabel di luar organisasi pelaksana dan birokrasi pemerintahan.

### 4. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2005) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*)

dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. (Aji 2014)

Sedangkan berdasarkan kutipan Wibawa dalam Samodra Wibawa dkk (1994) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. (Siapa) pelaksana program.
- f. Sumber daya yang dihasilkan.

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan *strategy actor* yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap. (Aji 2014; Aneta 2010)

Kapiouru (2014) menyatakan bahwa ada empat faktor yang sangat mempengaruhi kinerja dari implementasi yaitu :

- a. Kondisi lingkungan.
- b. Hubungan antar organisasi
- c. Sumber daya
- d. Karakter institusi implementor.

Purwanto (Syahida, 2014) mengemukakan beberapa faktor yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu :

- a. Kualitas kebijakan itu sendiri
- b. Kecukupan input kebijakan terutama anggaran
- c. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi dan lain sebagainya).

- d. Kapasitas implementor (Struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan dan lain sebagainya).
- e. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak).
- f. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Menurut pandangan Edward III, proses komunikasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh tiga hal penting yaitu :

- a. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat melakukan implementasi suatu keputusan, ia haruslah memahami bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- b. Faktor kedua yang dianggap mempengaruhi adalah kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan tersebut telah terimplementasi seperti yang direncanakan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi kebijakan tersebut haruslah jelas dan tidak membingungkan. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana tidak jelas serta tidak dapat menentukan kapan, bagaimana dan cara pelaksanaan suatu program harus dilakukan atau dilaksanakan sehingga akhirnya akan membingungkan pelaksana di tingkat bawah.
- c. Faktor ketiga adalah konsisten. Jika implementasi kebijakan ingin terjadi atau dilaksanakan secara efektif serta efisien, maka perintah pelaksanaan yang diberikan haruslah jelas, mudah dipahami serta konsisten. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan di tingkat bawah jelas, namun jika maksud dari perintah tersebut bertentangan, maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan di tingkatan bawah akan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan secara baik dan benar. (Winarno, 2011).

## **E. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah**

### **1. Konsep Sistem Informasi**

Menurut Nataniel dan Heliza (Dengen 2009) mendefinisikan sistem merupakan sekumpulan elemen yang dalam sebuah jaringan yang bekerja secara

teratur dalam satu kesatuan yang bulat dan terpadu untuk mencapai sebuah tujuan atau sasaran tertentu.

Definisi lain mengenai sistem dijelaskan oleh Huteahean (2015) yang mendefinisikan sebagai jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan dengan sasaran tertentu.

Berdasarkan definisi tersebut sistem merupakan sekumpulan elemen/unsur yang saling berhubungan dalam satu kesatuan terpadu yang bekerjasama secara teratur untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Informasi sebagaimana dikemukakan Nataniel dan Heliza (Dengen 2009) merupakan sebuah hasil dari sebuah pengolahan data yang melalui sekumpulan proses pada sebuah sistem, yang diolah sedemikian rupa sehingga layak untuk disajikan kepada masyarakat umum.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi adalah sebagai berikut :

Keterangan, pernyataan, gagasan serta tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi baik secara elektronik maupun non elektronik.

Jenis-jenis informasi tersebut menurut Nataniel dan Heliza dapat dipandang dari tiga segi yaitu manajerial, sumber, dan rutinitasnya. Dikuti dari Hartono (Sobri et al. 2019) informasi pada dasarnya adalah sehimpunan data yang telah diolah menjadi sesuatu yang memiliki arti dan kegunaan lebih luas. Sedangkan menurut Gestriawan informasi adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan dan berguna. (Sobri et al. 2019). Jogiyanto (2009) menyatakan bahwa informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli maka dapat disimpulkan bahwa informasi adalah hasil pengolahan dan pemrosesan data pada sebuah sistem menjadi bentuk yang mudah dipahami, relevan, dan berguna lebih luas sehingga layak untuk disajikan.

Sutabri (2006) menyatakan suatu informasi dikatakan berkualitas jika memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Akurat  
Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak bias serta menyesatkan dimana dimaksudkan bahwa informasi yang berasal dari sumber informasi hingga penerima informasi selalu ada kemungkinan gangguan sehingga informasi yang diperoleh atau diterima menjadi rusak.
- b. Tepat Waktu  
Informasi yang diterima tidak boleh terlambat, dimana jika terlambat, nilai dari informasi tersebut tidak ada. Informasi juga merupakan salah satu pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan.
- c. Relevan  
Relevansi informasi berbeda untuk suatu individu dengan individu lainnya atau suatu unit dengan unit lainnya sehingga suatu informasi harus ditujukan kepada penerima yang tepat.

#### *Sistem Informasi*

Sutrabri (Sobri et al. 2019) menyebutkan sistem mempunyai karakteristik atau sifat – sifat tertentu, yaitu : Komponen Sistem, Batasan Sistem, Lingkungan Luar Sistem, Penghubung Sistem, Masukan Sistem, Keluaran Sistem, Pengolahan Sistem dan Sasaran Sistem. Sistem informasi adalah kombinasi dari setiap unit dikelola *human* (orang), *hardware* (perangkat keras), *software* (perangkat lunak), jaringan komputer dan jaringan komunikasi data (komunikasi), dan *database* (basis data) yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi tentang yang bentuk organisasi. Sedangkan Nataniel dan Heliza (Dengen 2009) menyebutkan sistem informasi adalah kumpulan atau susunan yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta tenaga pelaksananya yang bekerja dalam sebuah proses berurutan dan secara bersama-sama saling mendukung untuk menghasilkan suatu produk.

Menurut Sintawati dan Sari (Ferdianto 2019) Sistem Informasi merupakan kesatuan elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang akan mendukung pembuatan keputusan dan melakukan kontrol terhadap jalannya perusahaan.

Menurut leitch dan Davis dikutip Jogiyanto (Hertati 2020) menyatakan bahwa sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Husein dan Wibowo (2006) menyatakan bahwa sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi dalam mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Sistem informasi ini terdiri dari informasi tentang orang, tempat, dan sesuatu dalam organisasi atau lingkungan yang melingkupinya.

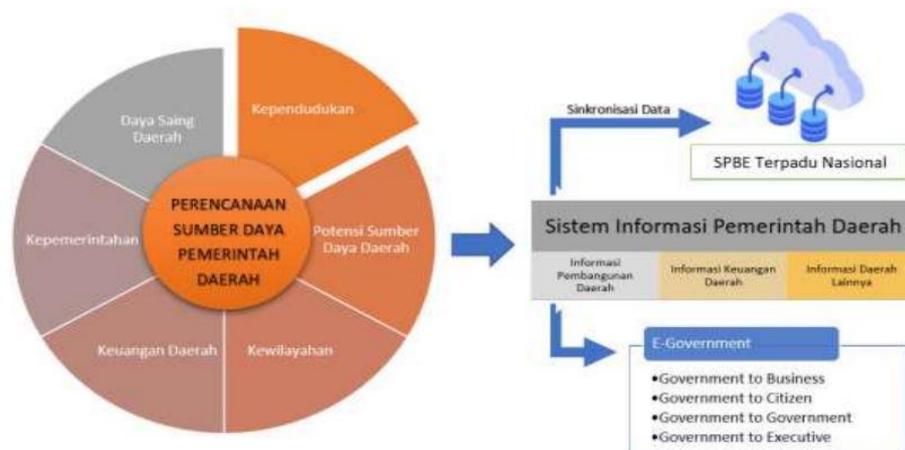
Sedangkan menurut Kristanto (Hertati 2020) Komponen-komponen yang ada dalam sistem informasi meliputi beberapa blok, yaitu : (1) Blok Masukan (*Input*); blok masukan ini mewakili data yang masuk kedalam sistem informasi. Input disini termasuk metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar; (2) Blok Model; blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematika yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. (3). Blok Keluaran (*Output*); produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkat manajemen serta semua pemakai sistem. (4) Blok Teknologi; teknologi merupakan alat yang digunakan untuk menerima masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu teknisi, perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*). (5) Blok Basis Data; basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan diperangkat keras komputer, basis data diakses atau dimanipulasi dengan menggunakan paket perangkat lunak yang disebut *database manajemen sistem* (DBMS). (6) Blok Kendali; beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem bisa dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat langsung cepat diatasi.

## **2. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**

Menurut Nataniel dan Hatta (2009) secara umum definisi Sistem Informasi Pemerintah merupakan sebuah pengembangan dari Sistem Informasi secara umum yang memiliki definisi sebagai kumpulan yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta tenaga pelaksananya yang bekerja dalam sebuah proses berurutan dan secara bersama-sama saling mendukung mengolah data untuk menghasilkan suatu produk berupa informasi. Sementara itu Kaur (2008)

mengemukakan bahwa SIPD memiliki definisi sebagai Pengelolaan informasi secara sistematis berdasarkan alur kerja yang sesuai dengan azas efisiensi dan efektifitas dalam mencapai tujuan organisasi diseluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Hal inilah yang melandasi definisi dari *e-government* sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju *good governance* seperti terlihat pada gambar di bawah ini. (Sugianing 2019)

Gambar 2 Konsep Sistem Informasi Pemerintah Daerah



Sumber: (Sugianing 2019)

Konsep SIPD seperti pada gambar terlihat bahwa pengembangan suatu SIPD merupakan suatu alur yang bekerja berkesinambungan mulai dari perencanaan sumber daya pemerintah, SIPD termasuk didalamnya sistem manual dan elektronik hingga hasil akhir berupa *e-government*. Dukungan infrastruktur yang memadai dan terintegrasinya seluruh data dan aplikasi pemerintah yang ada menjadi landasan dalam pengembangan kepemimpinan, panduan dan standar untuk penerapan *e-government* Pemerintah Republik Indonesia berbasis SPBE terpadu nasional maupun daerah. (Sugianing 2019)

Dasar pertimbangan lahirnya peraturan ini antara lain :

1. Untuk memudahkan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat yang terhubung dalam satu sistem informasi pemerintahan daerah.
2. Peraturan lama yaitu Permendagri nomor 98 Tahun 2018 tentang SIPD belum mengatur informasi pemerintahan daerah sehingga perlu dilakukan revisi peraturan.

SIPD setidaknya memenuhi terwujudnya keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin warga negara untuk mengakses informasi publik. Pengelolaan Informasi Daerah juga diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan Daerah dan Informasi keuangan Daerah) dan dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang dikelola dalam SIPD. Sehingga terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengatur teknis pengelolaan SIPD yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah, industri, dan masyarakat saat ini. Namun penting untuk diperhatikan agar Sistem Informasi Pemerintah Daerah harus mampu mendukung arsitektur SPBE yang terpadu secara nasional sebagaimana dituangkan dalam perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD dimana sistem informasi pemerintahan daerah yang dimaksud berbasis elektronik adalah sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, dan sistem pemerintahan daerah lainnya, juga sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah yang dimana merupakan produk Teknologi Informasi (IT) yang berbasis jejaring mengumpulkan data secara *online*, *realtime* dan terintegrasi. SIPD sebagai dukungan dalam terwujudnya program dan kegiatan dari tahap perencanaan hingga evaluasi yang berjalan rasional, efektif dan efisien, pemanfaatan data yang terintegrasi tentang perkembangan pembangunan di setiap daerah, serta transparansi akuntabilitas publik ke masyarakat. (Kumayus 2020)

SIPD dibangun sesuai kerangka regulasi, memiliki alur proses yang lengkap (prinsip manajemen), menggunakan kodifikasi sebagai basis data, terintegrasi serta efektif dan efisien dibandingkan sistem informasi eksisting atau yang pernah ada sebelumnya. (Tosepu 2021)

Jenis informasi pemerintahan daerah yang dimuat di dalam SIPD antara lain:

1. Informasi Pembangunan Daerah

SIPD mampu mengelola data dan informasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan stakeholder terkait. Lebih khusus lagi, dalam SIPD mampu memfasilitasi penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD, dan RENJA PD, Sehingga mudah diperoleh analisis dan

profil dari pelaksanaan pembangunan daerah, serta mampu menjadi dasar dalam pembaharuan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Informasi mengenai perencanaan pembangunan meliputi kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah.

## 2. Informasi Keuangan Daerah

SIPD mampu mengelola data keuangan daerah melalui stakeholder terkait secara lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi. Proses pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud meliputi:

- a. Perencanaan penganggaran daerah
- b. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
- c. Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- d. Pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan daerah
- e. Pertanggung jawaban barang milik daerah
- f. Informasi keuangan daerah lainnya

Pengelolaan data keuangan daerah menjadi sangat penting terutama dalam mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan khususnya keuangan daerah. Pengkodean dan pos anggaran daerah akan dipetakan secara detail dalam proses perencanaan, dan dilaksanakan secara tepat, sehingga menghasilkan pelaporan yang lebih akurat dan cepat. Pengkodean kegiatan secara nasional juga sangat membantu dalam integrasi data keuangan daerah dengan sistem informasi pemerintah pusat terutama dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban.

## 3. Informasi Pemerintahan Daerah lainnya

SIPD mampu memberikan informasi umum lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi umum tersebut dapat berupa Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun, PERDA, dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh stakeholder terkait. (Sugianing 2019)

Tujuan pengembangan SIPD antara lain: (1) Menyatukan data perencanaan, keuangan dan pelaporan daerah seluruh Indonesia; (2) Menyeragamkan proses perencanaan, keuangan dan pelaporan seluruh Indonesia; (3) Meminimalisir anggaran pemerintah daerah untuk mengembangkan SIPD berbasis elektronik di

bidang perencanaan, keuangan, pelaporan daerah, ke depannya hanya ada satu sistem yaitu SIPD; (4) Melakukan percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk seluruh Indonesia melalui BPD dan bank negara seluruh Indonesia.(Tosepu 2021)

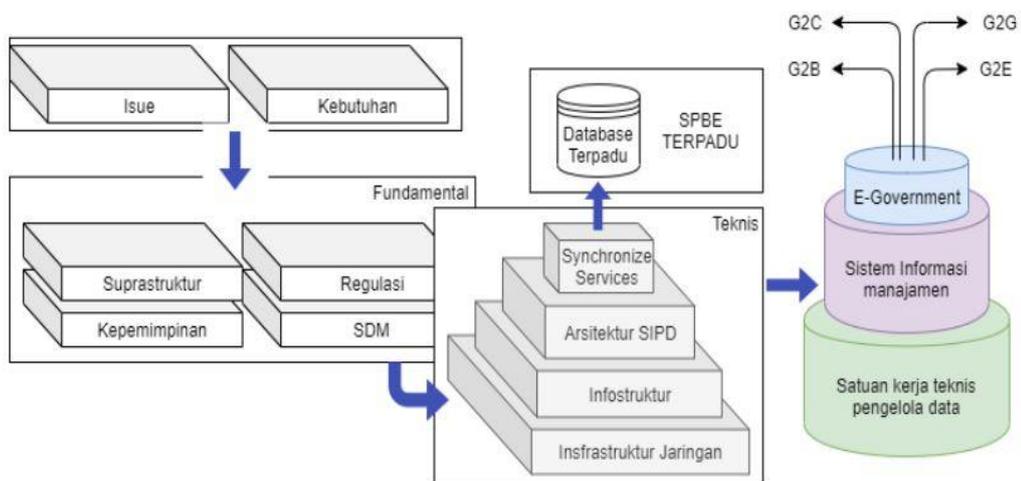
Adapun manfaat yang bagi pemerintah pusat antara lain: (1) Tersedianya informasi pemerintah daerah; (2) Bahan pertimbangan perumusan kebijakan nasional; (3) Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan. Bagi pemerintah daerah antara lain: (1) Efektivitas dan efisiensi manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah melalui sistem informasi yang saling terhubung; dan (2) Mempermudah penyampaian informasi antar tingkatan pemerintah. Bagi masyarakat mendapatkan akses terkait informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pintu *website* dan bagi pelaku usaha mempermudah dalam melihat kondisi daerah melalui analisis dan profil pembangunan daerah sebagai dasar pertimbangan investasi (Tosepu 2021)

Dalam pengembangan SIPD perlu diperhatikan aspek komunikasi baik bersifat teknologi maupun non teknologi. Pembangunan sistem komunikasi yang baik menjadi penentu dalam pengembangan SIPD secara menyeluruh, hal ini berkaitan erat dengan informasi yang dimuat dalam setiap komunikasi. Begitu pentingnya aspek komunikasi sebagai landasan pengembangan SIPD, maka peranan infrastruktur jaringan menjadi hal dasar dalam membentuk jaringan komunikasi mulai daerah hingga pusat. Jaringan komunikasi yang terbentang memudahkan aliran data hingga terkumpul dalam pusat data dan informasi sebagai dasar pengolahan data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Jaringan komunikasi sosial juga penting menjadi *support sistem*, terutama untuk menjangkau daerah-daerah yang belum tersentuh infrastruktur jaringan komunikasi teknis. Selain itu jaringan komunikasi sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai wahana untuk memperluas cakupan penyebaran informasi yang berasal dari SIPD. Perkembangan SIPD, telah menjadi suatu alasan untuk mempersatukan seluruh sumber daya informasi yang dimiliki, sehingga memudahkan seluruh pihak yang terkait untuk mengelola dan memanfaatkan informasi yang tersedia bagi kepentingan publik maupun pemerintah. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan pembenahan seluruh aspek terkait dengan pengembangan SIPD diantaranya adalah :

1. Aspek suprastruktur yang menyangkut regulasi, edukasi, dan SDM.
2. Aspek insfrastruktur jaringan menyangkut peralatan teknis telekomunikasi dan jaringan internet.
3. Aspek aplikasi yaitu SIPD yang mendukung SPBE terpadu nasional.
4. Aspek insfrastruktur konten data yang terkandung dalam SIPD. (Sugianing 2019)

Keempat aspek tersebut akan menjadi faktor penentu dalam pengembangan SIPD menuju SPBE terpadu nasional. Kerangka pengembangan SIPD sangat penting untuk dibuat dalam bentuk rancang bangun guna memvisualisasikan konsep pemikiran yang terkandung agar mudah dimengerti dan digambarkan. Penggambaran rancang bangun sangat membantu dalam menyusun masterplan dalam setiap rencana pengembangan SIPD. Berikut dapat divisualisasikan kerangka pemikiran pengembangan SIPD dalam menuju SPBE terpadu nasional seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 3 Arsitektur SIPD



Sumber : (Sugianing 2019)

Berdasarkan ilustrasi pada gambar di atas jelas bahwa SIPD akan mencakup seluruh aspek teknis maupun non teknis yang terintegrasi secara nasional yang dijelaskan sebagai berikut. (Sugianing 2019)

1. Aspek Fundamental  
Pengembangan SIPD disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat akan informasi yang transparan, sehingga memunculkan inisiatif dari pemerintah untuk mengembangkan atau memperbaiki Sistem Informasi yang ada untuk meningkatkan pelayanan kepada publik menuju *good governance*. Idealisme

tersebut kemudian dituangkan dalam suprastruktur meliputi kepemimpinan, regulasi, dan pemenuhan SDM. Setelah suprastruktur terbentuk, selanjutnya adalah penyusunan pengelolaan dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen dalam pelaksanaan dan pengembangan SIPD beserta satuan kerja pendukung teknis yang terkait dalam pelaksanaan SIPD.

## 2. Aspek Teknis

Setelah seluruh landasan berpijak SIPD terbentuk, maka mulailah dibentuk infrastruktur teknis mengenai bagaimana SIPD dibangun beserta ruang lingkup teknologi beserta permasalahannya, serta bagaimana proses bisnis informasi mulai dari tingkat daerah hingga pusat. Berikut bahasan utama dalam membentuk kerangka teknis yaitu:

- 1) Bahasan infrastruktur jaringan
- 2) Bahasan infrastruktur informasi
- 3) Bahasan arsitektur aplikasi
- 4) Bahasan proses bisnis
- 5) Bahasan proses integrasi data antar sistem pendukung SIPD maupun dengan sistem informasi terkait lainnya.

## 3. Aspek Pendukung

Adapun aspek pendukung dari terwujudnya SIPD meliputi proses dan mekanisme yang jelas mengenai integrasi data dengan sistem informasi terkait, serta pengelolaan dan pengendalian SIPD oleh satuan kerja pendukung SIPD.

### **F. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori Keagenan (*Agency Theory*) melibatkan hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen. Teori ini berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori Keagenan menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (prinsipal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (agen) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Pendelegasian terjadi ketika seseorang atau satu kelompok orang (*prinsipal*) memilih orang atau kelompok lain (agen) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. (Mccubins 2000)

Teori Keagenan dilandasi oleh tiga asumsi, yaitu asumsi sifat manusia (*human assumptions*), asumsi keorganisasian (*organizational assumptions*), serta asumsi informasi (*information assumptions*). Asumsi sifat manusia dikelompokkan menjadi 3, yaitu : (1) *Self Interest*, adalah sifat manusia untuk mengutamakan kepentingan sendiri, (2) *Bounded-rationality*, adalah sifat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas, dan (3) *risk aversion*, adalah sifat manusia yang lebih memilih mengelak dari risiko. Asumsi keorganisasian dikelompokkan menjadi 3, yaitu : (1) konflik sebagai tujuan antar partisipan, (2) efisiensi sebagai suatu kriteria efektivitas, serta (3) asimetri informasi antara pemilik dan agen. (Eisenhardt 1989)

Adanya tujuan yang berbeda antara prinsipal dan agen akan menimbulkan masalah keagenan. Masalah agensi dikendalikan oleh sistem pengambilan keputusan yang memisahkan fungsi manajemen dan fungsi pengawasan. Pemisahan fungsi manajemen yang melakukan perencanaan serta implementasi terhadap kebijakan perusahaan dan fungsi pengendalian yang melakukan ratifikasi dan monitoring terhadap keputusan penting dalam organisasi akan memunculkan konflik kepentingan diantara pihak-pihak tersebut. (Fama and Jensen 1983)

Pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Terdapat hubungan keagenan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. (Mardiasmo 2002)

Dalam Teori keagenan, pemerintah daerah sebagai agen bagi masyarakat (*prinsipal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa banyak terjadi *information asymmetri* antara pihak agen (pemerintah) dengan yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Dengan adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya korupsi atau penyelewengan yang rentan dilakukan oleh pemerintah (agen). Sebagai konsekuensinya, harus terdapat akuntabilitas atas kinerja pemerintah (agen) sebagai *mekanisme checks and balances* agar dapat mengurangi *informatin asymmetry* (Mardiasmo 2002).

Oleh karena itu, mengingat pentingnya akuntabilitas terhadap publik tersebut, perlu dilakukan revitalisasi *e-government* yang dapat meningkatkan

akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah demi kepentingan kesejahteraan masyarakat luas. Pemerintah daerah sebagai agen memanfaatkan produk *e-government* dengan menerapkan strategi dalam memaksimalkan pemanfaatan untuk tercapainya tujuan pembangunan.

### **G. Konsep Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting yaitu tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan) dan waktu (kapan bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan dimasa depan. Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon atau reaksi terhadap masa depan (Abe : 2005).

Perencanaan adalah salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting dimana di dalamnya terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi. Perencanaan adalah tahap awal dalam kegiatan suatu organisasi terkait dengan pencapaian tujuan organisasi tersebut.(Kumayus 2020) Perencanaan mempunyai banyak definisi dan arti. Dalam hal ini perencanaan adalah suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang di arahkan pada pencapaian sasaran tertentu (Fikri, Nurpratiwi, and Saleh 2015).

Makna perencanaan sangat tergantung pada paradigma yang dianut. Dikutip dari Hadi, menurut Davidoff, et al (2005) bahwa dari perspektif paradigma rasional memberikan batasan tentang perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan masa depan melalui suatu urutan pilihan. Kemudian menurut Dror dalam Hadi (2005) perencanaan merupakan suatu proses untuk mempersiapkan seperangkat keputusan untuk melakukan tindakan masa depan. (Ashari 2015)

Berdasarkan kutipan Conyers & Hill dalam Arsyad (2004) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang, sehingga pemanfaatan terhadap berbagai sumber daya baik sumber daya alam, modal dan sumber daya manusia membutuhkan perencanaan yang baik sehingga nantinya dapat dikelola secara baik untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.(Fikri, Nurpratiwi, and Saleh 2015)

Dari beberapa definisi perencanaan jelas bahwa perencanaan dapat dilihat sebagai bentuk strategi yang diterapkan untuk organisasi publik maupun privat. Jika dikaitkan dengan perencanaan pembangunan daerah maka perencanaan pembangunan yang dibuat daerah berkaitan dengan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan daerah di samping menggambarkan kepentingan lokal juga merupakan penjabaran dari perencanaan pusat (nasional) (Ashari 2015).

Siagian dalam Riyadi dan Bratakusumah (2003) menyatakan bahwa pembangunan adalah suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu perubahan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan suatu sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.

Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif dan aplikatif. Nugroho dan Dahuri (2004) mendefinisikan perencanaan pembangunan wilayah adalah konsep yang utuh dan menyatu dengan pembangunan wilayah. Secara luas, perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang didalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek social dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan.

Listyianingsih (2014) mendefinisikan perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu konsep yang terintegrasi dari beberapa teori yang ada yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang implementatif sehingga mampu mendorong perubahan terhadap kondisi masyarakat dan negara yang jauh lebih baik.

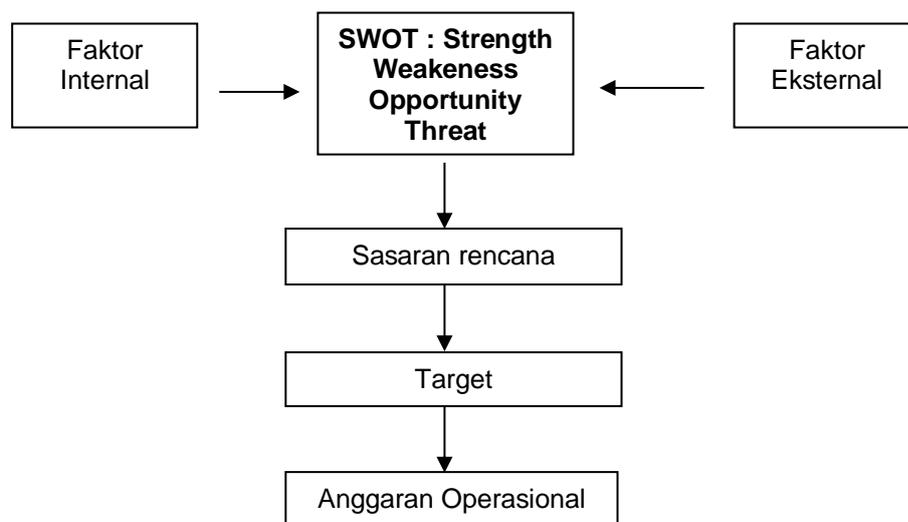
## H. Analisis SWOT

Strategi suatu organisasi atau perusahaan agar berjalan dengan efektif, tentu saja akan membutuhkan suatu informasi mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang berkaitan dengan situasi yang dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Salah satu metode dalam mengetahui hal tersebut adalah analisa SWOT.

SWOT adalah kepanjangan dari *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunities* (peluang) dan *threats* (tantangan). Analisa SWOT adalah analisa kondisi internal maupun eksternal di suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*). Sementara analisa eksternal mencakup faktor peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Threat*) (Rangkuti : 2015). Kotler (2009) menyatakan bahwa analisa SWOT adalah suatu teknis yang dirancang khusus untuk membantu mengidentifikasi strategi pemasaran yang harus dijalankan perusahaan. Analisa SWOT mencakup lingkungan internal dan eksternal perusahaan secara keseluruhan.

Setelah kita mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, maka akan dapat disusun suatu rencana atau strategi yang akan diterjemahkan dalam rencana-rencana operasional dalam mencapai tujuan yang diinginkan sebagaimana yang dijelaskan dalam gambar 4 berikut.

Gambar 4 Proses perencanaan dengan analisis SWOT



(Sumber : Rangkuti, 2015)

Konsep dasar pendekatan SWOT terlihat sederhana yaitu kita dapat mengetahui kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*) dari organisasi perusahaan serta mengetahui peluang (*Opportunity*) dari luar organisasi perusahaan serta ancaman (*Threat*) di luar organisasi yang merugikan organisasi perusahaan (Rangkuti, 2015).

David (2006) menyatakan bahwa analisis SWOT ini melibatkan empat unsur utama yaitu :

1. Kekuatan. Item ini didefinisikan sebagai sumber daya keterampilan atau keunggulan lain yang dimiliki dibandingkan dengan kompetitor sehingga menjadi bahan atau unsur keunggulan kompetitif bagi suatu organisasi (perusahaan) di pangsa pasar yang dimasuki.
2. Kelemahan. Item ini dimaknai sebagai keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, kapabilitas dan hal lainnya yang secara efektif dan efisien akan menghambat kinerja dari suatu organisasi (perusahaan).
3. Peluang. Item ini dimaknai sebagai situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan organisasi (perusahaan). Kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang seperti perubahan teknologi dan meningkatnya hubungan antara perusahaan dengan pembeli atau pemasok merupakan salah satu gambaran peluang yang dipunyai oleh organisasi (perusahaan).
4. Tantangan. Item ini didefinisikan sebagai situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan organisasi (perusahaan). Tantangan merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau posisi yang diinginkan oleh suatu organisasi (perusahaan).

Matriks SWOT menggambarkan beberapa strategi (Salusu dalam Maulidia, 2012) yaitu :

1. Strategi SO yaitu memanfaatkan peluang yang ada dengan keunggulan organisasi.
2. Strategi ST yaitu memobilisasi beberapa keunggulan untuk mencapai sasaran (*mobilization*).
3. Strategi WO yaitu memilih faktor mana yang dipacu dan faktor mana yang ditunda.
4. Strategi WT yaitu perlu kehati-hatian atau kewaspadaan dalam mencapai sasaran.

Analisis SWOT akan membandingkan antara faktor eksternal Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threat*) dengan faktor internal Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*weakness*).

Kuadran I : Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth oriented strategy*).

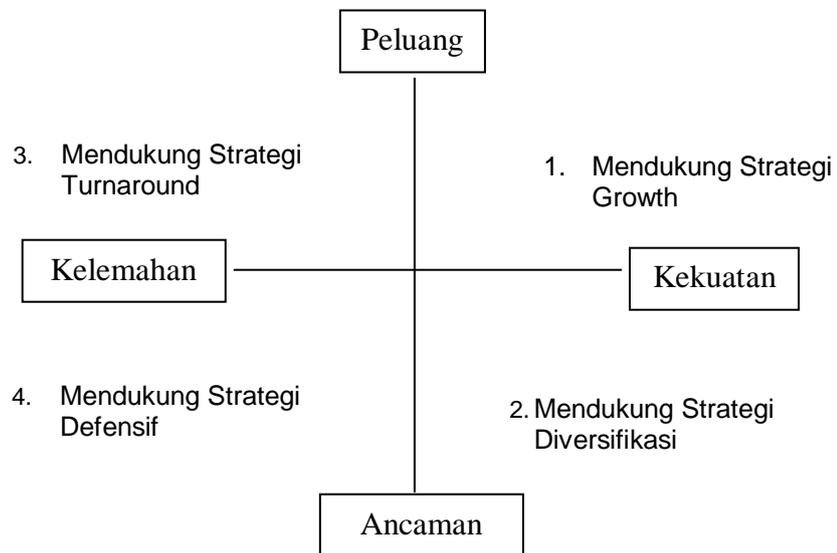
Kuadran II : Meskipun menghadapi beberapa ancaman, perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan strategi diversifikasi (produk/jasa).

Kuadran III : Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain pihak, perusahaan menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. Fokus strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih.

Kuadran IV : Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

Kuadran SWOT akan diuraikan dalam gambar berikut

Gambar 5 Kuadran SWOT



(Sumber : Rangkuti, 2015)

### I. Tinjauan Hasil Penelitian

Citta Nadya Celine Wurara (2020) "Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kota Manado (Studi di Bappelitbangda Kota Manado)". SIPD

atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah sistem informasi yang digunakan BAPPELITBANGDA sebagai sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pemerintah Kota Manado. Tujuan penelitian mengetahui bagaimana implementasi sistem informasi pemerintahan daerah kota Manado. Hasil penelitian ini yakni penerapan sistem informasi pemerintahan daerah yang belum terlaksanakan dengan baik ini karena kurangnya keefisien dalam hal waktu, ini dikarenakan banyaknya SKPD yang tidak dapat memasukan data tepat waktu sesuai waktu yang ditentukan Bappelitbangda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diajukan adalah lokasi penelitian yang dilakukan serta beberapa variabel yang dilakukan dalam penelitian ini yang tidak dilakukan oleh penelitian sebelumnya yaitu mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SIPD dan merumuskan strategi yang tepat dalam implementasi SIPD setelah mengidentifikasi faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal dari pengelolaan SIPD.

Agung Laksana Jamal dkk (2016) “ Kajian tentang Fungsi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Poso. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah penggunaan Sistem Informasi untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Poso. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif deskriptif dengan sampel penelitian 43 orang (sensus sampling). Pengumpulan data dilakukan dengan pembagian kuisisioner dan pedoman wawancara. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam merencanakan proses pembangunan di Kabupaten Poso dengan penggunaan SIPD. Penelitian ini juga menyarankan perlunya pengembangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan sehingga akan dapat memudahkan dalam penyusunan dokumen penting dan rencana pengembangan oleh setiap SKPD di lingkup Pemkab Poso dengan cara peningkatan kapasitas SDM (pengelola SIPD) dan menyediakan biaya tambahan (insentif) sebagai pemberian motivasi bekerja bagi para pengelola SIPD tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian dilakukan untuk menganalisis SIPD dalam kaitan dan dukungan terhadap dokumen perencanaan pembangunan, sedangkan penelitian ini dengan penelitian yang akan

dilakukan adalah lokasi penelitian, perbedaan jenis penelitian dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian campuran (gabungan penelitian kuantitatif dan kualitatif) sementara penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Alfres Ngugu Mungai (2017) "E-Government Strategy Implementation and performance of the Public Sector in Kenya. Penelitian ini ingin menitikberatkan pada strategi pelaksanaan *e-government* dan kinerja sektor publik di Kenya. Studi atau penelitian ini dipersempit untuk menetapkan hubungan antara infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi dan kinerja sektor publik di Kenya. Penelitian ini juga dilakukan dalam rangka menguji hubungan kerangka kelembagaan pemerintahan dan kinerja sektor publik di Kenya. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dan explanatory dengan memiliki populasi penelitian sebanyak 13,228 orang yang terkait dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kenya. Studi yang digunakan memiliki pengambilan sampel bertingkat dan proporsional dan menghasilkan sampel penelitian sebanyak 384 orang. Penelitian menggunakan pedoman wawancara dan kuisioner dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menemukan hubungan signifikan antara pelaksanaan *e-government* dengan kinerja sektor publik dan infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Temuan penelitian lainnya menemukan bahwa kelembagaan *e-government* memiliki pengaruh signifikan pada kinerja sektor publik. Rekomendasi dari penelitian ini mendorong perlunya diatur dengan baik implementasi *e-government* sehingga memastikan setiap proses terkait *e-government* di instansi pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu ingin melihat implementasi *e-government* pada institusi atau lembaga pemerintahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi penelitian dan jenis penelitian dimana penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif sedangkan penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif.

James Gathungu (2012) "*Contextual Factors affecting e-government strategy implementation and its impact on public sector performance in Kenya*". Penelitian ini menilai faktor kontekstual yang mempengaruhi implementasi *e-government* dan dampaknya terhadap kinerja sektor publik di Kenya. Penelitian ini ingin meninjau studi *e-government* yang relevan dari berbagai perspektif baik perspektif local, regional dan internasional sehingga didapatkan perspektif yang komprehensif mengenai pelaksanaan *e-government* dan kaitan dengan sektor

publik yang sering berkembang di Kenya. Isu atau permasalahan terkait strategi, kebijakan, teknologi dan aspek organisasi menjadi basis analisis dalam penelitian yang menguji pengaruh pelaksanaan atau implementasi *e-government* di Kenya pada saat ini. Penelitian ini menemukan telah adanya difusi atau penetrasi jaringan internet dalam mendorong implementasi *e-government* pada institusi pemerintah di Kenya namun hasilnya belum secara spesifik mampu menangani faktor-faktor kontekstual unik yang ada dan melakat pada jasa layanan publik di Kenya. Realisasi ini mendorong dibutuhkannya penelitian lebih lanjut terhadap masalah mendasar yang mempengaruhi implementasi *e-government* di Kenya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah kesamaan dalam melihat strategi yang diimplementasikan terhadap aplikasi *e-government* yang dilakukan di instansi pemerintah yang dapat mempengaruhi sektor publik, sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah lokasi penelitian serta jenis penelitian, dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif sementara jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif.

Ni Ketut Sudianing dan Ketut Agus Seputra (2019) “Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah”. Kualitas perencanaan pembangunan sangat didukung oleh adanya kesediaan data dan informasi yang akurat dan lengkap, menyangkut sumberdaya pendukung pembangunan, baik menyangkut sumberdaya manusia, sumberdaya alam, maupun sumberdaya energi yang ada, serta berbagai permasalahan yang dapat diajukan sebagai agenda dalam proses perencanaan pembangunan. Kepentingan dalam memperoleh data lengkap dan dapat dipercaya dalam sistem perencanaan daerah disajikan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tujuan penelitian menyajikan konsep, urgensi, jenis dan pengembangan SIPD serta kualitas perencanaan pembangunan daerah yang didukung oleh SIPD. Hasil penelitian yakni merumuskan dua simpulan penting yaitu : a) pentingnya tata kelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara berkualitas dalam menunjang Perencanaan Pembangunan di daerah yang berkualitas dan b) SIPD menjadi bagian *e-government* memiliki fungsi kritis dalam perencanaan pembangunan daerah untuk menghasilkan: 1) pemerintahan yang responsif terhadap persoalan-persoalan daerah, 2) peningkatan partisipasi dan demokrasi inklusif dalam perencanaan daerah; 3) dapat mendorong transparansi dan keterbukaan publik di daerah. Saran yang disampaikan penulis adalah: 1) Pemerintah daerah dalam penerapan dan tata kelola SIPD melibatkan berbagai

pihak, termasuk pihak swasta untuk meningkatkan daya dukung dan kemampuan dalam mengelola dan menyajikan data berkaitan dengan perencanaan pembangunan di daerah dan 2) Penyediaan anggaran dan SDM yang memadai sangat penting dalam mewujudkan tata kelola SIPD yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di masa depan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah kesamaan dalam menganalisis peran SIPD dalam menunjang perencanaan pembangunan daerah dimana kualitas perencanaan pembangunan tentu akan meningkat dengan adanya kesediaan data dan informasi yang akurat dan lengkap dengan pemanfaatan sebuah sistem informasi (SIPD). Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi penelitian serta variabel penelitian yang diteliti dimana penelitian ini tidak merumuskan strategi dalam pengelolaan SIPD yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan analisis SWOT sebagaimana penelitian yang akan dilakukan.

Henni Fariha (2015) “Penerapan *Electronic Government* Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Sebagai Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sragen)”. Perkembangan teknologi yang semakin kompleks mengharuskan lembaga pemerintahan juga harus mengubah citra pemerintahan yang dinilai kaku menjadi lebih lentur dengan mengadopsi nilai-nilai teknologi. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja yang lebih lentur melalui penerapan *electronic government* dalam sistem informasi pemerintahan daerah. Tujuan penelitian mengkaji penerapan *e-government* dalam sistem informasi pemerintahan daerah kabupaten Sragen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *electronic government* dalam sistem informasi pemerintahan daerah di Kabupaten Sragen dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mengandalkan teknologi tepat guna. Keberlanjutan penerapan sistem informasi pemerintahan daerah Kabupaten Sragen dapat terwujud melalui strategi yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sragen serta *goodwill* dari pimpinan tertinggi Kabupaten Sragen yang mengamanatkan seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah melibatkan teknologi informasi dan komunikasi. Strategi dibentuk melalui jaringan organisasi pendukung, pemanfaatan teknologi informasi, sistem manajemen dan proses kerja pemerintah, dan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diajukan

yaitu kesamaan pandangan terkait pentingnya implementasi *e-government* dalam bentuk SIPD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu lokasi penelitian dimana penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sragen sementara penelitian yang dilakukan mengambil Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai lokasi penelitian. Perbedaan lainnya yaitu penelitian yang dilakukan mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi SIPD yang dilakukan oleh Pemerintahan daerah, yang tidak dilaksanakan pada penelitian ini.

Yohanes Yohannes (2016) "Strategi Penerapan Teknologi Informasi di Pemerintah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penerapan teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai dasar merumuskan strategi yang paling tepat dipilih dalam menerapkan teknologi informasi guna mewujudkan *electronic government*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor internal terdiri atas: 1) sumber daya manusia, 2) sarana dan prasarana, 3) dana/anggaran, dan 4) budaya organisasi, yang masing-masing teridentifikasi sebagai kekuatan (*strength*) ataupun kelemahan (*weakness*). Sedangkan yang menjadi faktor eksternal terdiri : 1) kondisi ekonomi, 2) politik dan hukum, 3) sosial budaya, 4) demografi dan 5) perkembangan teknologi dan globalisasi, yang selanjutnya berpotensi menjadi peluang (*opportunities*) ataupun ancaman (*threats*). Hasil analisa SWOT terhadap lingkungan strategis dengan mempertimbangkan seluruh unsur kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sintang ditetapkan 7 (tujuh) strategi dalam penerapan teknologi informasi yaitu: 1) Pengembangan organisasi dan tata kerja, 2) Pembuatan aturan perundangan dan kebijakan, 3) Pengembangan SDM untuk menerapkan teknologi informasi, 4) Pembangunan infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data yang memadai, 5) Pengembangan perangkat-perangkat lunak yang diperlukan, 6) Pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak dan keras/jaringan, dan 7) Pengembangan dan koordinasi layanan informasi yang mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang kompetitif serta dapat menarik minat investor ke Kabupaten Sintang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu merumuskan strategi yang diperlukan dalam menerapkan Sistem Informasi pada pemerintah daerah dengan menggunakan analisis SWOT. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu lokasi penelitian,

dimana penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat sementara penelitian yang akan dilakukan, dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Perbedaan penelitian lainnya yaitu perbedaan rumusan masalah yaitu menganalisis konsep implementasi kebijakan Sistem Informasi yang tidak dilakukan oleh penelitian ini namun dibahas oleh penelitian yang akan dilakukan.

Melkikor Nikolar Ngalumsine Sitokdana (2019) “Rencana Strategis Penerapan Sistem Informasi Eksekutif Pemerintah Provinsi Papua”. Pemerintah Provinsi Papua terus menggalakkan penerapan *e-government* dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Namun, nampaknya implementasi *e-government* sejauh ini belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan karena para eksekutif sering lamban dalam mengambil kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis rencana strategis penerapan sistem informasi eksekutif di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Berdasarkan hasil analisis dan perumusan rencana strategis, ada dua rekomendasi yang diusulkan yaitu: pertama perlu adanya roadmap pengembangan *e-government* yang disusun secara holistik dan komprehensif. Selanjutnya, perlu dilakukan sosialisasi dan pengawasan secara berkala pada seluruh unit organisasi agar bersungguh-sungguh menerapkan aplikasi *e-government* guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kedua, penerapan aplikasi *e-government* yang mengacu pada Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan dan ditetapkan oleh Kementerian Kominfo RI perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Hal ini penting, mengingat Papua merupakan Daerah Otonomi Khusus dan memiliki berbagai persoalan terkait *affirmative action* terhadap orang asli Papua. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh menganalisis penerapan Sistem Informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian dimana penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Papua, sementara penelitian yang akan dilakukan, mengambil Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai lokasi penelitian. Perbedaan lainnya yaitu pendekatan penelitian yang dipergunakan dimana penelitian ini menggunakan analisis lingkungan internal dan eksternal dengan pendekatan *Political, Economic, Social, Teknologi, Legal dan Environment* (PESTLE), sementara penelitian yang akan dilakukan menggunakan analisis lingkungan internal dan eksternal yang mengacu pada analisis *Strength, Weakness, Opportunity and Threats* (SOWT).

Jeims Dizon (2010) "Perencanaan Strategis Sistem Informasi Pada Pemkab Timor Tengah Selatan". Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dan peranannya yang begitu besar dalam menunjang sistem operasional dan manajerial pada instansi pemerintahan dan juga semakin meningkatkannya keinginan untuk mewujudkan pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi (*e-government*), semakin terasa pula perlunya pemerintah daerah memiliki sebuah rencana strategis sistem informasi, sebagai suatu arahan strategis dan kerangka kebijakan penggunaan sistem informasi bagi pemerintah daerah untuk proses manajemen pemerintahan yang lebih sistematis, terarah dan berkesinambungan, dalam kerangka mendukung tugas fungsi pemerintahan kearah efektifitas pelayanan publik serta pelayanan antar instansi pemerintah (*Government to Citizen, Government to Business, Government to Employee, Government to Government*) yang seoptimal mungkin sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu rencana strategis sistem informasi untuk kerangka waktu 2011 sampai dengan 2016 bagi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan juga bisa menjadi rekomendasi untuk pengembangan sistem informasi daerah secara optimal. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat 36 (tigapuluh enam) jenis aplikasi SI yang diklasifikasikan berdasarkan orientasi fungsi pelayanan. Untuk memudahkan dalam implementasinya maka dibuatkan skala prioritas menggunakan matriks portofolio aplikasi yang kemudian dijelaskan secara detail dalam *time frame* rancangan implementasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah kesamaan dalam menganalisis pentingnya system informasi yang dipergunakan dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi penelitian dimana penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Timor Tengah Selatan sementara penelitian yang akan dilakukan memilih Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai lokasi penelitian. Perbedaan lainnya yaitu terletak pada fokus penelitian dimana penelitian ini mengidentifikasi berbagai aplikasi sistem informasi dalam suatu rencana system informasi pemerintah sementara penelitian yang akan dilakukan adalah menganalisis implementasi system informasi (SIPD) beserta faktor yang mempengaruhi implementasi serta merumuskan strategi yang diperlukan dalam pengelolaan SIPD berdasarkan identifikasi faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Faria Ruhana (2017) "Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia". Sistem informasi pembangunan daerah merupakan sistem pengelolaan data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam manajemen kinerja pemerintah daerah. Dengan sistem informasi ini diharapkan data dan informasi yang digunakan tersedia dengan lengkap dan akurat dalam mendukung perencanaan pembangunan di daerah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui mekanisme penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah di Indonesia, agenda perencanaan pembangunan daerah dan penerapan SIPD dalam rangka perencanaan pembangunan di Indonesia. Hasil penelitian yaitu; 1) Mekanisme pelaksanaan SIPD dijalankan sesuai dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tentang SIPD, meliputi; a) penetapan tim SIPD oleh bupati/walikota, b) pengumpulan dan pengisian data, c) evaluasi data, dan d) pembinaan dan pengawasan. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti lemahnya pemahaman, koordinasi dan komitmen pemerintah daerah, data yang masih bersifat parsial, kurang lengkap dan kurang *update*, keterbatasan SDM, serta keterbatasan infrastruktur (akses internet); 2) Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan melalui tahapan penyusunan-penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana dalam bentuk perda. Keseluruhan tahapan ini sangat tergantung dari data dan informasi yang terdapat dalam SIPD; 3) Penerapan SIPD sangat mendukung dalam rangka perencanaan pembangunan daerah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah kesamaan dalam menganalisis SIPD dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah lokasi penelitian, acuan yang dipakai dalam penerapan SIPD dimana penelitian ini menggunakan acuan pada Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tentang SIPD sementara penelitian yang dilakukan mengacu pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD.

Nadya Balqis (2021) dengan judul penelitian Efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat. Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis terkait efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan terdiri dari wawancara serta studi dokumentasi. Hasil penelitian

menemukan beberapa kesimpulan yaitu : a) SIPD merupakan suatu sistem berbasis online yang memberi kemudahan dalam penyusunan proses perencanaan dan penganggaran, b) Dilihat dari segi waktu SIPD yang diterapkan oleh Dinas Transmigrasi serta Tenaga Kerja (DISTRANAKER) menciptakan informasi data yang lebih baik dan c) Dari segi ketepatan waktu, pemakaian SIPD mengakibatkan data yang diperoleh Dinas Transmigrasi serta Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat sudah lebih baik.

Catrina Ratu Tunggal Agung (2022) dengan judul penelitian Strategi Pemerintah Kota Bogor dalam Penerapan SIPD. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis strategi yang perlu dilakukan oleh Pemkot Bogor dalam menerapkan SIPD. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan alat analisis menggunakan PLS (*partial least square*), Kesimpulan penelitian ini antara lain : a) Pengukuran nilai tingkat kesiapan (*readiness*) pelaksanaan kerangka data SIPD pada Pemkot Bogor sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan dan strategi yang layak dilakukan adalah strategi SO dengan jalan mendorong kesiapan perangkat daerah dalam penggunaan SIPD pada proses perencanaan dan penganggaran, b) Kelayakan pelaksanaan kerangka data SIPD di Pemkot Bogor berada pada kriteria tidak layak. Strategi yang harus digunakan adalah Strategi SO yaitu meningkatkan kualitas sistem informasi agar mudah digunakan dan menyediakan sarana prasarana sistem informasi dan c) Kapabilitas SDM Pemkot Bogor dalam implementasi SIPD sudah dalam kriteria cukup baik namun harus ditingkatkan. Strategi yang perlu dilakukan adalah strategi WO yaitu meningkatkan kapabilitas SDM pemakai sistem informasi terutama SIPD yang memiliki keilmuan TIK sehingga akan lebih optimal dalam membuat konsep, aplikasi dan pengambilan keputusan.

Adapun rincian penelitian relevan yang diajukan dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut

Tabel 1 Mapping Penelitian Relevan

No	Nama /Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Citra Nadya Celine Wurara (2020)	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kota Manado (Studi di Bappelitbangda Kota Manado)	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	Penerapan SIPD di Kota Manado belum terlaksana dengan baik karena tidak efisien dari sisi waktu karena banyak SKPD yang tidak memasukkan data tepat waktu sesuai waktu yang direncanakan.
2	Agung Laksana Jamal dkk (2016)	Kajian tentang Fungsi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Proses Perencanaan	1. Proses Perencanaan Pembangunan 2. Fungsi SIPD dalam perencanaan	1. Pemanfaatan SIPD membantu dalam merencanakan proses pembangunan di Kabupaten Poso. 2. Perlunya dilaksanakan pengembangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan sehingga memudahkan dalam

Lanjutan Tabel 1

No	Nama /Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		pembangunan di Kabupaten Poso	pembangunan	penyusunan dokumen penting dan rencana pengembangan di setiap SKPD di lingkup Pemkab Poso. 3. Perlunya ditingkatkan kapasitas SDM pengelola SIPD dalam mendorong motivasi bekerja semua tahapan pelaksanaan dilakukan.
3	Alfres Ngugu Mungai (2017)	<i>E-Government Strategy implementation and performance of the Public Sector in Kenya</i>	1. Strategi Implementasi <i>e-government</i> 2. Kinerja Instansi Publik	Adanya hubungan yang signifikan antara pelaksanaan <i>e-government</i> dengan kinerja sector publik dan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kenya.
4	James Gathungu (2012)	<i>Contextual Factors affecting e-government strategy implementation and its impact on public sector performance in Kenya</i>	1. Implementasi <i>e-government</i> 2. Faktor yang mempengaruhi implementasi <i>e-government</i>	1. Difusi atau penetrasi jaringan internet mendorong implementasi <i>e-government</i> pada institusi pemerintah walaupun belum spesifik. 2. Beberapa faktor yang ditemukan mempengaruhi implementasi <i>e-government</i> yaitu kebijakan, teknologi dan aspek organisasi (kelembagaan).
5	Ni Ketut Sudianing dan Ketut Agus Seputra (2019)	Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam menunjang peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) 2. Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan : 1. Pentingnya tata kelola SIPD secara berkualitas dalam menunjang perencanaan pembangunan 2. SIPD menjadi bagian <i>e-government</i> dalam perencanaan pembangunan dalam menghasilkan pemerintahan yang responsif terhadap persoalan daerah, peningkatan partisipasi dan demokrasi inklusif dalam perencanaan daerah serta mendorong trans[aransi dan keterbukaan public di daerah.
6	Henni Fariha (2015)	Penerapan <i>Electronic Government</i> dalam sistem Pemerintahan Daerah sebagai Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Sragen)	1. Penerapan <i>e-government</i> 2. SIPD 3. Penyelenggara n Pemerintahan Daerah	1. Penerapan <i>e-government</i> dalam SIPD di Kabupaten Sreagen dapat dilaksnakan secara efektif dan efisien. 2. Keberlanjutan penerapan SIPD di Kabupaten Sragen dapat terwujud melalui strategi tepat yang dilakukan oleh Pemkab serta <i>goodwill</i> (niat baik) dari Pimpinan daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penerapan SIPD.
7	Yohannes Yohannes (2016)	Strategi penerapan teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.	1. Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal penerapan SIPD. 2. Strategi penerapan SIPD	1. Faktor Internal terdiri dari SDM, sarana dan prasarana, dana serta budaya organisasi, sementara factor eksternal terdiri dari kondisi ekonomi, politik dan hukum, sosial budaya, demografi serta perkembangan teknologi dan globalisasi. 2. Strategi yang perlu dilaksanakan yaitu a)pengembangan organisasi dan tata kerja, b)pembuatan aturan perundang-undangan dan kebijakan, c)pengembangan SDM dalam penerapan teknologi informasi, d)pembangunan infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data yang memadai. e)pengembangan perangkat lunak yang diperlukan, f)Pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak dan g)pengembangan dan koordinasi layanan informasi.

Lanjutan Tabel 1

No	Nama /Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
8	Mekikor Nilar Ngalumsine Sitokdana (2019)	Rencana Strategis Penerapan Sistem Informasi Eksekutif Pemerintah Provinsi Papua	Strategi penerapan Sistem Informasi Pemerintah Provinsi Papua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya roadmap pengembangan <i>e-government</i> yang disusun secara holistic dan komprehensif</li> <li>2. Perlu dilakukan sosialisasi dan pengawasan secara berkala pada seluruh SKPD di Provinsi Papua dalam menerapkan aplikasi <i>e-government</i> dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih</li> <li>3. Penerapan aplikasi <i>e-government</i> yang mengacu pada kerangka fungsional sistem pemerintahan perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah khusus seperti Provinsi Papua.</li> </ol>
9	Jemiz Dizon (2010)	Perencanaan Strategis Sistem Informasi pada Pemkab Timor Tengah Selatan	Perencanaan strategis Sistem Informasi	Hasil penelitian mendorong pemerintah untuk membuat rencana strategis sistem informasi dalam rangka mendukung tugas fungsi pemerintahan kearah efektifitas pelayanan publik serta pelayanan antar instansi pemerintah sesuai dengan visi dan misi pemerintah.
10	Faria Ruhana (2017)	Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)</li> <li>2. Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme pelaksanaan SIPD dijalankan sesuai dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tentang SIPD</li> <li>2. Perencanaan Pembangunan daerah diselenggarakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana dalam bentuk Perda.</li> <li>3. Penerapan SIPD mendukung dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.</li> </ol>
11	Nadya Balqis (2021)	Efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Kabupaten Aceh Barat	Efrktivitas Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SIPD adalah suatu sistem informasi berbasis online yang memberikan kemudahan dalam penyusunan proses perencanaan dan penganggaran.</li> <li>2. SIPD bagi Disnakertrans Kabupaten Aceh Barat mampu menciptakan informasi data yang lebih baik dan lebih cepat.</li> <li>3. Penggunaan SIPD menghasilkan data yang diperoleh oleh Disnakertrans Kabupaten Aceh barat lebih baik yang terlihat dari kecepatan penerbitan Peraturan Bupati untuk tahun anggaran 2021.</li> </ol>
12	Catrina Ratu Tunggal Agung (2022)	Strategi pemerintah Kota Bogor dalam Penerapan SIPD	Strategi Pemerintah dalam penerapan SIPD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengukuran nilai tingkat kesiapan Pemkot Bogoro dalam pelaksanaan kerangka data SIPD sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan. Strategi yang layak dilakukan adalah strategi SO dengan jalan mendorong kesiapan perangkat daerah dalam penggunaan SIPD pada proses perencanaan dan penganggaran.</li> <li>2. Kelayaan pelaksanaan kerangka data SIPD di Pemkot Bogor berada pada kriteria tidak layak. Strategi yang harus digunakan adalah Strategi SO yaitu meningkatkan kualitas sistem informasi agar mudah digunakan dan menyediakan sarana prasarana sistem</li> </ol>

Lanjutan Tabel 1

No	Nama /Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				informasi. 3. Kapabilitas SDM pemkot Bogor dalam implementasi SIPD sudah dalam kriteria cukup baik namun harus ditingkatkan. Strategi yang perlu dilakukan adalah strategi WO yaitu meningkatkan kapabilitas SDM pemakai sistem informasi terutama SIPD yang memiliki keilmuan TIK sehingga akan lebih optimal dalam membuat konsep, aplikasi dan pengambilan keputusan.

Sumber : Olah Data (2022)

### J. Dasar Kerangka Konseptual

Ide dasar penelitian ini adalah penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penelitian ini didasari dari pasal 391 di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah disebutkan bahwa pemerintahan daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah berupa informasi pembangunan daerah maupun informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu informasi. Dan pada pasal 395 juga disebutkan pemerintah daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi pemerintahan daerah lainnya. Untuk memenuhi kewajiban akan pasal-pasal tersebut maka dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Sebagaimana tertera pada pasal 1 ayat 12 sistem informasi pemerintahan daerah yang kemudian disebut SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Peraturan ini juga didasarkan pada pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disebutkan bahwa arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu secara nasional.

Tuntutan juga mengamanatkan setiap pemerintah daerah wajib untuk menyediakan layanan informasi berupa layanan informasi pemerintahan daerah dan keuangan daerah dalam bentuk sistem informasi sehingga tercipta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Fakta di lapangan menemukan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Provinsi Sulawesi Tenggara tidaklah mudah dan menemui beberapa kendala seperti ketidaklengkapan data informasi pembangunan daerah, keterlambatan penginputan data perencanaan oleh SKPD serta operator penginputan di tiap SKPD yang belum paham penggunaan aplikasi serta adanya perubahan nomenklatur Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan temuan lapangan tersebut dalam kaitan untuk mengatasi permasalahan tersebut penulis berpendapat bahwa diperlukan strategi penerapan SIPD yang tepat dapat memberikan solusi terhadap permasalahan di atas. Mengacu pada hal diatas, maka perlu dilakukan kajian terkait implementasi kebijakan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yaitu SIPD yang terintegrasi nasional di dalam satu data sistem informasi berbasis elektronik di Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengetahui sejauh mana penerapan SIPD yang telah berjalan. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yaitu SIPD yang terintegrasi nasional di dalam satu data sistem informasi berbasis elektronik ini perlu dilakukan penelitian secara mendalam.

SIPD sebagai sebuah kebijakan publik yang perlu diimplementasikan yang dimaknai sebagai pelaksanaan kebijakan yang telah disetujui dengan penggunaan sarana (alat) sehingga mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Implementasi kebijakan sesungguhnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Beberapa model implementasi telah dikemukakan oleh para ahli dan dalam penelitian ini peneliti memutuskan untuk menggunakan teori implementasi kebijakan dengan model George C. Edward untuk menganalisis fenomena di dalam implementasi kebijakan SIPD yang terintegrasi nasional di dalam satu data sistem informasi berbasis elektronik yang kompleks menjadi suatu model implementasi kebijakan yang tidak rumit. Setelah implementasi kebijakan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yaitu SIPD yang terintegrasi nasional di dalam satu data sistem informasi berbasis elektronik di Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara dikaji faktor-faktor yang berperan dalam penerapan tersebut di Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara untuk merumuskan

strategi penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang tepat setelah mengidentifikasi dengan analisis faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal dalam penerapan SIPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Adapun kerangka pikir penelitian ini akan diuraikan pada gambar berikut

Gambar 6 Kerangka konsep penelitian

